



UNIVERSITAS GADJAH MADA
FAKULTAS GEOGRAFI

PROFIL KERJA SAMA

DALAM NEGERI TAHUN 2023 & 2024

FAKULTAS GEOGRAFI UGM

Unit Kerja Sama Dalam Negeri
Fakultas Geografi
Universitas Gadjah Mada
Tahun 2023 & 2024

Oleh:

Unit Kerja sama Dalam Negeri,
Fakultas Geografi,
Universitas Gadjah Mada

Editor:

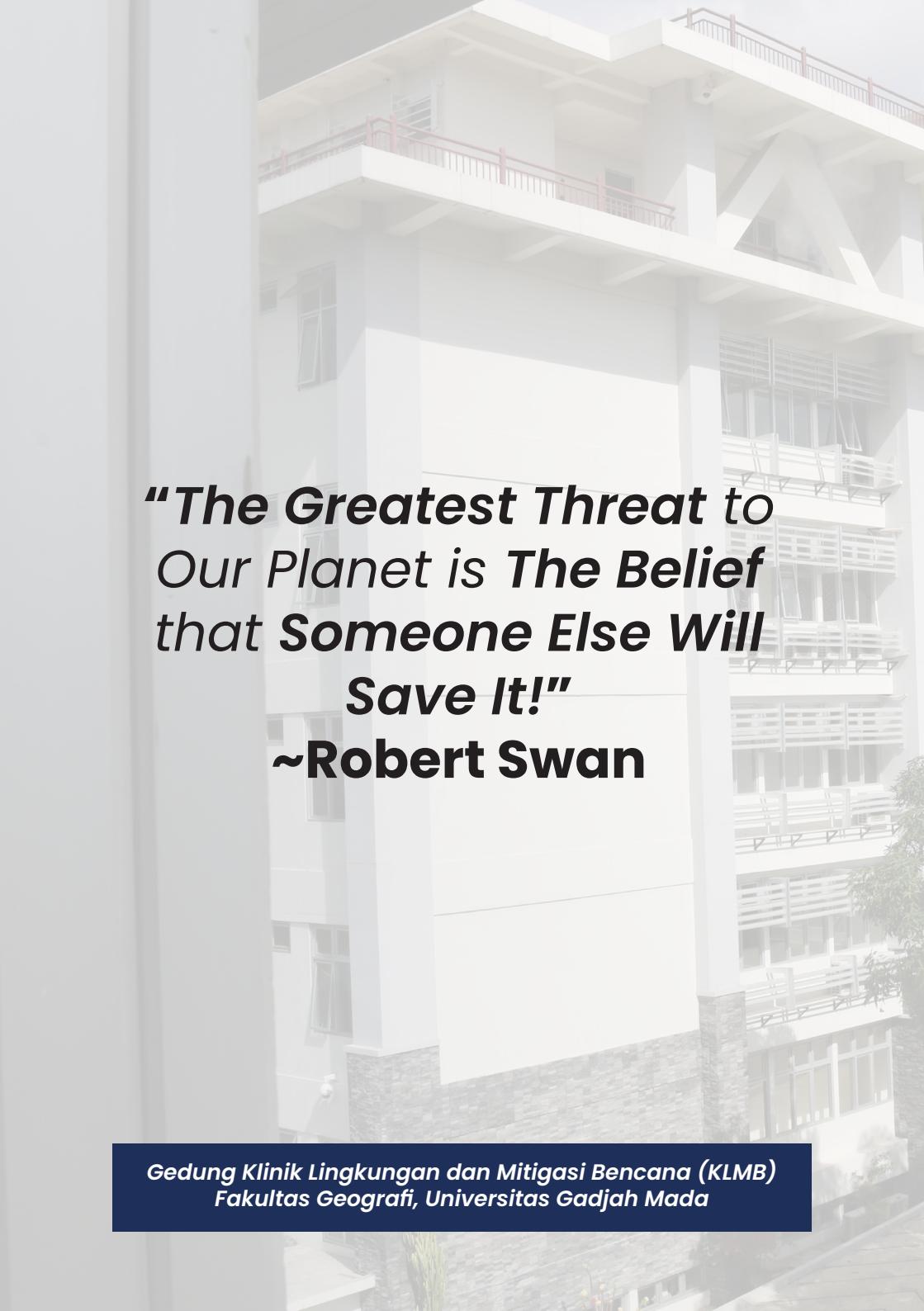
Dr. Nur Mohammad Farda, S.Si., M.Cs.
Yanuar Sulistyaningrum, S.Pd., M.Sc.

Desain dan Layout:

Diki Akhyar Amanatulloh
Clara Alverina

DAFTAR ISI

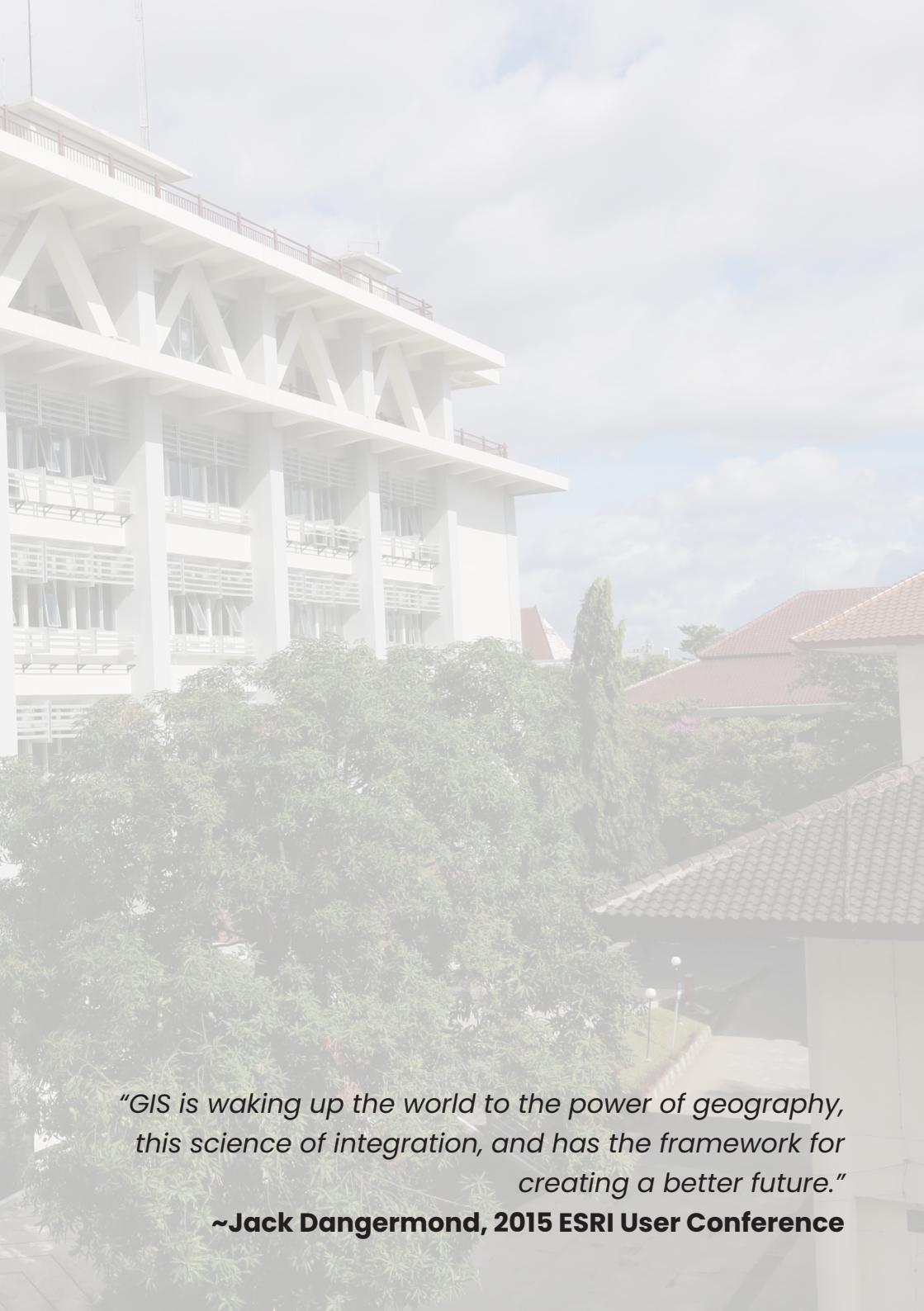
Sambutan Dekan	1
Sambutan Wakil Dekan P2MKSA	2
Pilar Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat	3
Fasilitas Penunjang Pilar Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat	4
Lingkup Kegiatan Riset dan Kerja Sama FGE	5
Lingkup Keilmuan Fakultas Geografi	6
Peta Sebaran Kerja Sama Dalam Negeri Tahun 2023-2024	7
Jumlah Kerja Sama Dalam Negeri FGE	9
Infografis Data Kerja Sama Dalam Negeri Tahun 2024	10
Daftar Kerja Sama Dalam Negeri FGE Tahun 2023	11
Executive Summary Kerja Sama Dalam Negeri Tahun 2023	14
Daftar Kerja Sama Dalam Negeri FGE Tahun 2024	42
Executive Summary Kerja Sama Dalam Negeri Tahun 2024	45
SOP Inisiasi Kerja Sama UKDN	67
Kontak Unit Kerja Sama Dalam Negeri FGE	68



***“The Greatest Threat to
Our Planet is The Belief
that Someone Else Will
Save It!”***

~Robert Swan

**Gedung Klinik Lingkungan dan Mitigasi Bencana (KLMB)
Fakultas Geografi, Universitas Gadjah Mada**



“GIS is waking up the world to the power of geography, this science of integration, and has the framework for creating a better future.”

~Jack Dangermond, 2015 ESRI User Conference



Sambutan

Dekan Fakultas Geografi

Universitas Gadjah Mada



Assalamualaikum wr.wb.

Salam sejahtera untuk kita semua,

Lahir sejak tahun 1963, Fakultas Geografi telah bertransformasi menjadi salah satu global player dalam dunia Pendidikan Tinggi Geografi di Dunia. Kerja keras yang penuh dedikasi yang dibangun oleh civitas Fakultas Geografi lintas generasi selama 59 tahun menghantarkan Fakultas Geografi menjadi 150 besar dunia menurut QS World University Ranking dan terbaik di tanah air. Akreditasi unggul untuk seluruh program studi baik S1, S2 maupun S3 telah diperkuat dengan akreditasi internasional ASIIN (*Accreditation in Engineering Computer Sciences Natural Sciences Mathematics*) bagi seluruh program sarjana. Dengan jumlah staff dosen sebanyak 83 dan 74% telah bergelar Doktor, telah memperkuat kualitas akademik di Fakultas Geografi. Fakultas Geografi telah membuktikan bahwa “prestasi adalah tradisi”. Reputasi global tersebut tentunya ditopang oleh berbagai macam inovasi baik dalam bidang pendidikan, pengajaran, sumberdaya manusia, infrastruktur, riset maupun jejaring kemitraan nasional – regional – global.

Profil Kerjasama Dalam Negeri Fakultas Geografi juga menunjukkan peranan dan komitmen kami dalam mendukung pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan dan kesejahteraan manusia untuk mendukung visi Sustainable Planet yang kami usung. Pada tahun 2013 – 2024, kami telah melakukan sebanyak 440 kegiatan kerja sama dalam negeri dengan berbagai macam institusi dalam negeri di seluruh Indonesia, dengan topik yang sangat bervariasi sesuai dengan dasar keilmuan geografi yang kami miliki.

Fakultas Geografi, Universitas Gadjah Mada, selalu siap untuk mendukung pembangunan Indonesia dengan kolaborasi multi-institusi. Oleh karena itu, Fakultas Geografi akan menerima dengan tangan terbuka seluruh potensi kolaborasi yang dapat dilakukan demi kemajuan bangsa.

Wassalamualaikum wr.wb.

Dekan Fakultas Geografi
Universitas Gadjah Mada

Dr. Danang Sri Hadmoko, S.Si., M.Sc



Sambutan

**Wakil Dekan Bidang Penelitian,
Pengabdian kepada Masyarakat, Kerja Sama,
dan Alumni Fakultas Geografi Universitas Gadjah Mada**



**Assalamualaikum wr.wb.
Salam sejahtera untuk kita semua,**

Fakultas Geografi, Universitas Gadjah Mada merupakan salah satu fakultas dengan profil kerja sama dalam negeri yang aktif. Profil kegiatan kerja sama dalam negeri Fakultas Geografi ini merupakan bentuk kolaborasi multi-helix dengan melibatkan berbagai macam stakeholder seperti Kementerian, Pemerintah Provinsi, Kabupaten, Kota, Kecamatan, Pemerintah Desa, *Non-Governmental Organization* (NGO) dan Pihak Swasta dalam Negeri dengan focus pada kegiatan penelitian, pengabdian masyarakat serta pelibatan tenaga ahli dan mahasiswa yang berkegiatan dengan mitra dengan fokus tematik kegiatan yang sangat bervariasi dari kajian lingkungan, bencana, sosial-ekonomi kependudukan, pembangunan/pengembangan wilayah, serta pemetaan menggunakan teknologi Geospasial: Penginderaan Jauh, Sistem Informasi Geografis dan Kartografi.

Pada tahun 2023-2024 ini, terdapat 93 kegiatan kerja sama dalam negeri dengan melibatkan mitra dalam negeri dari berbagai macam institusi dan lembaga. Angka tersebut menunjukkan komitmen dan semangat Fakultas Geografi untuk terus mendukung kolaborasi dengan mitra dalam negeri yang membutuhkan *expertise* dari Fakultas Geografi, Universitas Gadjah Mada.

Company Profile Fakultas Geografi ini menunjukkan kompetensi penelitian dan pengabdian masyarakat dari civitas akademika. Kami juga turut mengucapkan terima kasih pada para mitra kerja sama atas kepercayaannya kepada Fakultas Geografi untuk bersinergi bersama. Selain itu, kami mengajak para calon mitra apabila tertarik untuk melakukan kegiatan kerja sama dengan Fakultas Geografi untuk dapat mengontak kami dengan mengunjungi situs <https://ukdn.geo.ugm.ac.id/>

Wassalamualaikum wr.wb.

Wakil Dekan P2MKSA Fakultas Geografi
Universitas Gadjah Mada

Dr. Dyah Rahmawati Hizbaron, S.Si., M.T., M.Sc.



PILAR PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADAMASYARAKAT

Fakultas Geografi

Tema payung P2M FGE dilaksanakan untuk mendukung prioritas tema P2M UGM, Rencana Induk Riset Nasional dan Pencapaian SDGs yang sangat erat kaitannya dengan kajian keilmuan Geografi. Tema payung P2M ini didukung oleh keberadaan 8 unit laboratorium, 3 pusat kajian, kelompok riset, dan 2 unit kerjasama yang saling berkoordinasi dalam kegiatan P2M.

CLOUDS OF RESEARCH & INNOVATION



Disaster Risk
& Climate
Resilience



Nat Resource
& Env
Management



smart Dev Plan
& Green Living
Space



Livelihood &
Wellbeing



Geospatial AI



PRIORITAS UGM



Energy



Agro-Food



Health



Information
Technology

Ilmu Geografi

merupakan salah satu cabang ilmu yang memiliki keluasan cakupan. Seiring berjalanannya waktu, pendekatan geografis yang meliputi keruangan-waktu, lingkungan dan kompleks wilayah terus dituntut untuk mampu menjawab tantangan permasalahan lokal hingga global.

Tema penelitian di Fakultas Geografi diarahkan untuk memenuhi payung tema "Sustainable Planet atau Planet Berkelanjutan". Dalam mendukung payung tema tersebut, saat ini telah berjalan tema penelitian seperti Natural Resource and Environmental Management, Disaster Risk and Climate Resilience, Geospatial AI, Livelihood & Wellbeing, serta Smart Sustainable Development Planning & Green Living Space. Tema tersebut berupaya menguatkan peran Fakultas Geografi untuk terus berkontribusi menjawab permasalahan lokal hingga global saat ini seperti:

- Kondisi kebencanaan;
- Perubahan iklim dan pemanasan global;
- Pendataan simpanan karbon;
- Pandemi dan isu kesehatan global;
- Resesi ekonomi dunia;
- Krisis pangan dan energi dunia;
- Inovasi energi baru terbarukan;





FASILITAS PENUNJANG PILAR PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT



**Laboratorium
Tata Ruang**



**Laboratorium Hidrologi dan
Klimatologi Lingkungan (HKL)**



**Laboratorium Kependudukan,
dan Sumberdaya Ekonomi (KSE)**



**Laboratorium Geomorfologi
Lingkungan dan Mitigasi Bencana (GLMB)**



Laboratorium Kartografi



**Laboratorium Sistem
Informasi Geografis (SIG)**



**Klinik Lingkungan dan
Mitigasi Bencana (KLMB)**



**Laboratorium
Penginderaan Jauh**



**Pusat Pendidikan, Interpretasi Citra
dan Survey Terpadu (PUSPICS)**



**Laboratorium
Kewilayahian**



**Pusat Studi Permukiman,
Transmigrasi, dan Daerah
Perbatasan (PUSPERTRANS)**



Lingkup Kegiatan Riset dan Kerja Sama FGE



Climate
Change



Environment



Disaster
Management



Socio-economic
& Demographic



Sustainable
Development



Smart City



Spatial
Planning



Regional
Development



Spatial
Modelling
(GIS)



Remote
Sensing



Geospatial Big
Data and
Geospatial
Artificial
Intelligence



Mapping &
Geo-
visualization

**"Pembangunan berkelanjutan (Sustainable Living Planet)
dengan menggunakan pendekatan geografi dan teknologi
geospasial sebagai landasan dan tujuan dalam keseluruhan
lingkup kegiatan Fakultas Geografi"**



UNIVERSITAS GADJAH MADA
FAKULTAS GEOGRAFI

Lingkup Keilmuan Fakultas Geografi



Geografi Lingkungan



Geografi
Pembangunan



Sains
Informasi
Geografi



Pendidikan



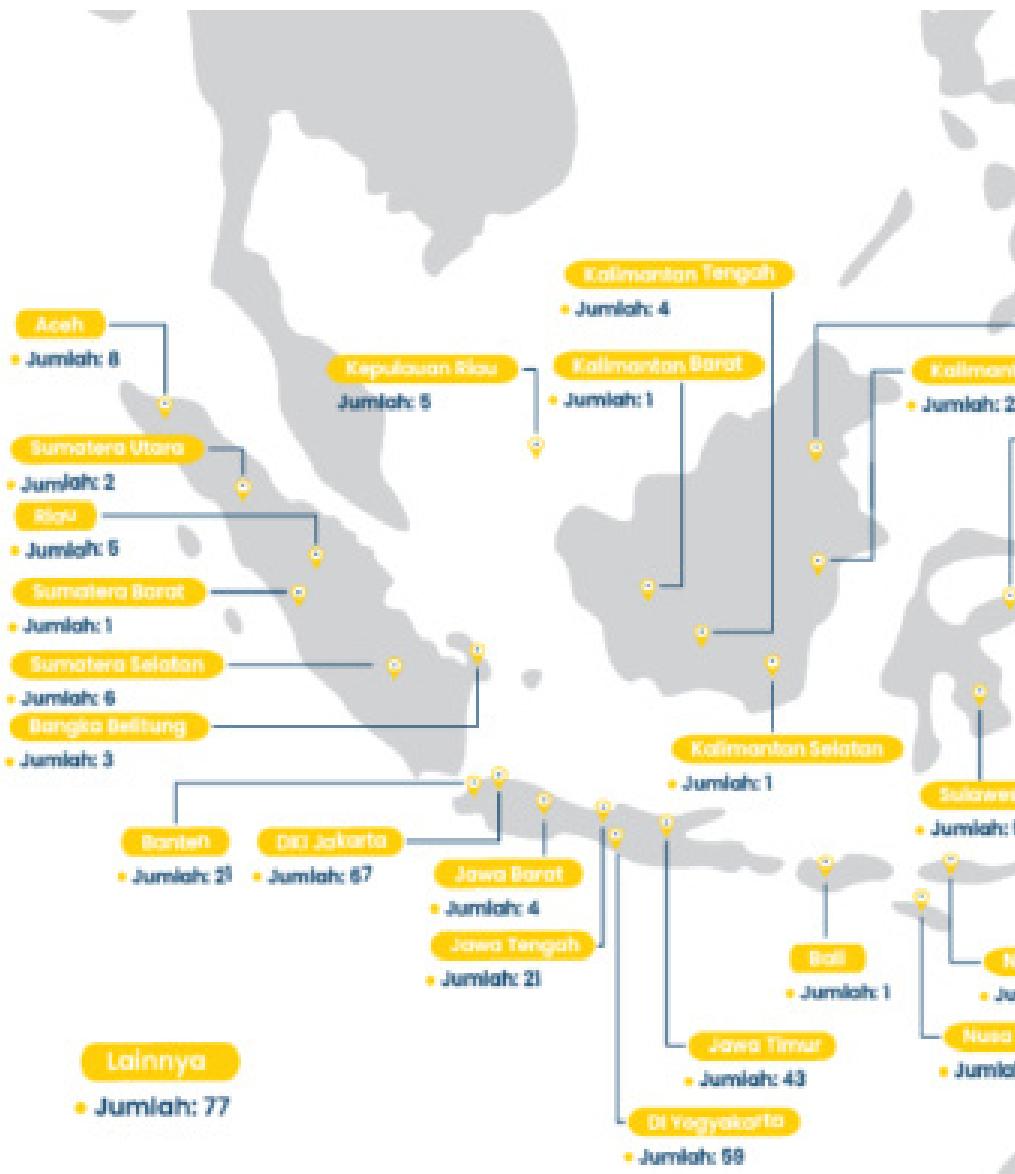
Penelitian



Pengabdian kepada
Masyarakat

Tri Dharma Perguruan Tinggi

Peta Sebaran Kerja



Sama Dalam Negeri



Jumlah Kerja Sama Dalam Negeri

Fakultas Geografi UGM

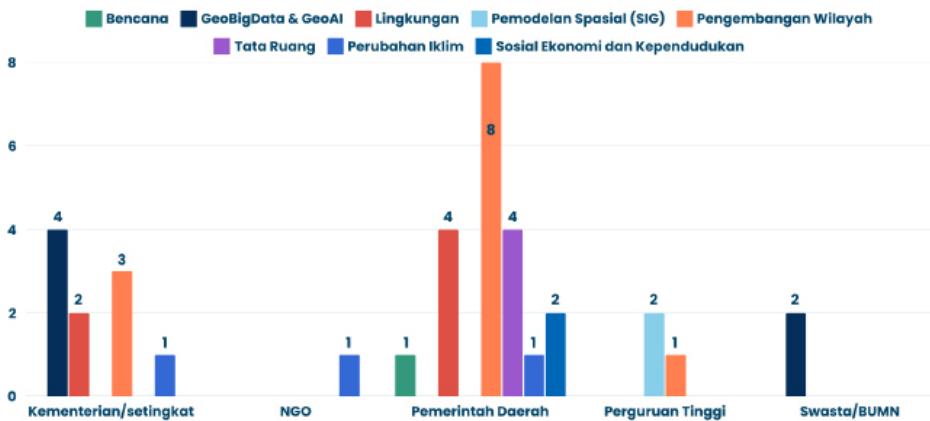
Tahun 2023 Tahun 2024

47

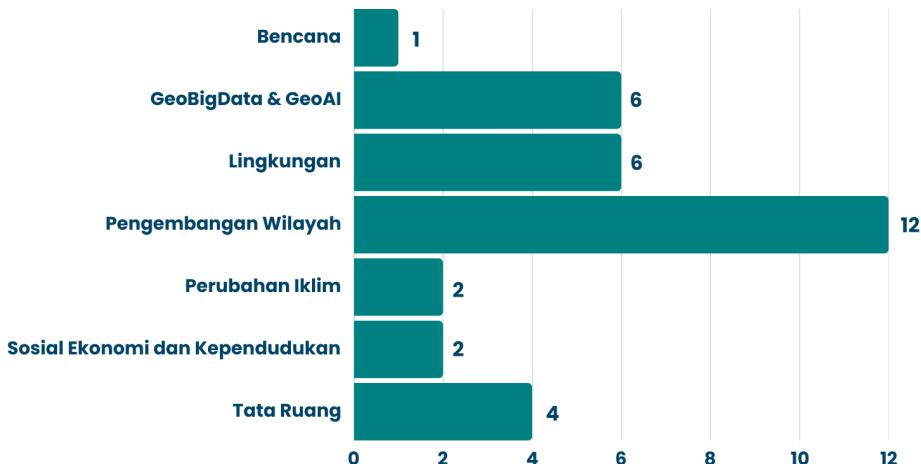
46

Total Kerja Sama Dalam Negeri

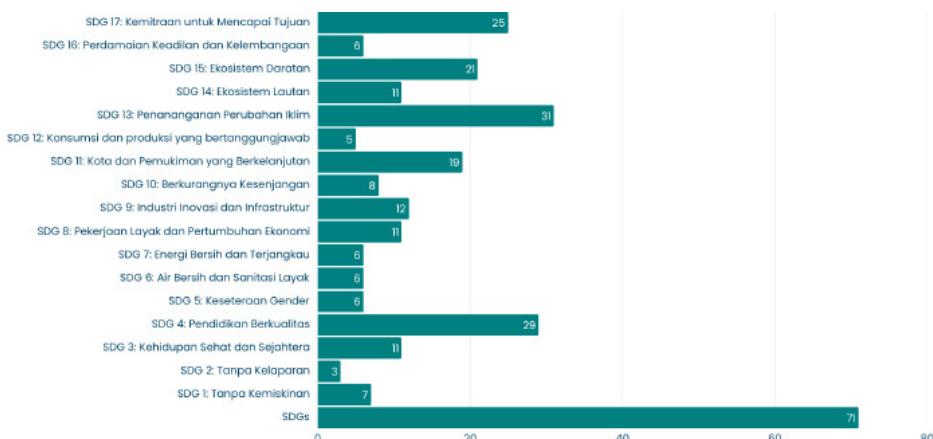
Bidang Kegiatan Kerja Sama dengan Instansi Mitra Dalam Negeri Tahun 2024



Fokus Sebaran Bidang Kegiatan Kerja Sama dengan Pemerintah Tahun 2024



Pemberitaan SDGs dari Kegiatan Kerja Sama Dalam Negeri Fakultas Geografi Tahun 2024





**UNIVERSITAS GADJAH MADA
FAKULTAS GEOGRAFI**

**DAFTAR
KERJA SAMA DALAM NEGERI
TAHUN 2023**



AUDITORIUM MERAPI

DAFTAR KERJA SAMA DALAM NEGERI

FAKULTAS GEOGRAFI TAHUN 2023

No	Judul	Mitra
1	Survei Topografi dengan Menggunakan Unmanned Aerial Vehicle dan LIDAR	PT Pertamina Hulu Rokan
2	Pemutakhiran Peta Tutupan Kelapa Sawit Indonesia	Kementerian Pertanian
3	Kajian Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Yogyakarta	Bappeda Kota Yogyakarta
4	Rencana Revitalisasi Kawasan Transmigrasi Tahun 2024	Kementerian Desa PDTT
5	Penyusunan Dokumen Kajian Instrumen Teknis Pemanfaatan Ruang Kawasan Sempadan Pantai di DIY	Distarlu Provinsi DIY
6	Penyusunan Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kota Madiun	DLH Kota Madiun
7	Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2025-2045	Bappeda Kabupaten Kutai Barat
8	Penyusunan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup (D3TLH) Berbasis Jasa Lingkungan di Kabupaten Bangka Tengah	DLH Kabupaten Bangka Tengah
9	Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Batam	DLH Kota Batam
10	[PELATIHAN] Paket Pengadaan Jasa Bimbingan Teknis Konsep Transpolitan dalam Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Kementerian Desa PDTT
11	Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sukamara Tahun 2025-2045	Bappeda Kabupaten Sukamara
12	Pendampingan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kepulauan Yapen	Dinas PUPR Kabupaten Kepulauan Yapen
13	Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis - Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (KLHS-RPJMD) Kabupaten Kediri	DLH Kabupaten Kediri
14	Penyempurnaan Penyusunan Peta Kesesuaian Lahan Komoditas Perkebunan Berbasis Data Spasial Perkebunan Berkelaanjutan Menggunakan Aplikasi Sistem Informasi Perencanaan Terintegrasi Perkebunan (SICANTIK)	Kementerian Pertanian
15	Pengadaan Foto Udara Kota Salatiga Tahun 2023	Dinas PUPR Kota Salatiga
16	Upgrade Geoportal Kota Bontang Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023	Bappeda Kota Bontang
17	Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis - Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (KLHS-RPJPD) Kabupaten Kediri	DLH Kabupaten Kediri
18	Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (KLHS RPJPD) Kota Kediri	DLH Kota Kediri
19	Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Salatiga Periode Tahun 2025-2045	Bappeda Kota Salatiga
20	Jasa Konsultansi Penyusunan Draf Peraturan Walikota tentang Penegasan Batas Kelurahan di Empat Kemandren (Mantrijeron, Wirobrajan, Jetis dan Gondokusuman) Kota Yogyakarta	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta
21	Penyusunan Dokumen KLHS Rencana Detail Tata Ruang Kota Baru Maja	DLH Kabupaten Lebak
22	Penyusunan Grand Design Pembangunan Kependudukan Kota Yogyakarta Tahun 2020-2045	Bappeda Kota Yogyakarta
23	Peningkatan Kapasitas untuk Pemahaman Perencanaan Wilayah dengan Penerapan Solusi Berbasis Alam bagi Pemangku Kepentingan	WWF Indonesia
24	Pengembangan webGIS Rekomendasi Pemupukan di Perkebunan 46 Nota Kesepahaman Bersama antara Fakultas Geografi UGM dan PT Geo Indo Asia	PPKS Medan

DAFTAR KERJA SAMA DALAM NEGERI

FAKULTAS GEOGRAFI TAHUN 2023

No	Judul	Mitra
25	Penyusunan Buku Desapolitan Tahun 2023	Kementerian Desa PDTT
26	Service Provider to Develop and Deliver Capacity Development on Geographic Information Systems and Remote Sensing	GIZ
27	Pendataan Penerangan Jalan Umum Tahap V	Dinas PU Perkim Kota Yogyakarta
28	Penyusunan RPJPD Kabupaten Seruyan	Bappeda Kabupaten Seruyan
29	Penyusunan Dokumen Evaluasi dan Model Kemitraan Program SUPERTANGGUH	Bappeda Kota Salatiga
30	Pendidikan Pascasarjana Program Master (S2) Dan Program Doktor (S3) Di Fakultas Geografi UGM Tahun 2023	BMKG
31	Hibah Dana Sistem/Fasilitas Penunjang Geoportal Pusat Informasi Kebumian Siti Nurbaya	PT Indah Kiat Pulp and paper
32	Kegiatan Bimbingan Teknis Geoportal Bontang	Bappeda Kota Bontang
33	Sewa Menyewa Ruang E601 di Fakultas Geografi	Kementerian Pertanian
34	Perjanjian Kerja Sama antara Universitas Gadjah Mada dan Kartika Pratiwi tentang Sewa Menyewa Lapak di Kantin Geografi	Kartika Pratiwi
35	Perjanjian Kerja Sama antara Universitas Gadjah Mada dan Muhammad Ali AR tentang Sewa Menyewa Lapak di Kantin Geografi	Muhammad Ali AR
36	Perjanjian Kerja Sama antara Universitas Gadjah Mada dan Widiatmoko tentang Sewa Menyewa Lapak di Kantin Geografi	Widiatmoko
37	Perjanjian Kerja Sama antara Universitas Gadjah Mada dan Albudiani tentang Sewa Menyewa Lapak di Kantin Geografi	Albudiani
38	Perjanjian Kerja Sama antara Universitas Gadjah Mada dan Dharmawati Persatuan Unsur Pelaksana Fakultas Geografi tentang Sewa Menyewa Lapak Di Kantin Geografi	DWP
39	Program Magang Kampus Merdeka di Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY	Dinas PU Perumahan dan ESDM DIY
40	Program Magang Kampus Merdeka Di Stasiun Klimatologi D.I Yogyakarta	BMKG DIY
41	Program Magang Kampus Merdeka Di Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Magelang	Dinas PUPR Kota Magelang
42	Program Kampus Merdeka Di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta	DLH Kabupaten Sleman
43	Program Magang Kampus Merdeka di Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul	Dinas PPA Kabupaten Bantul
44	Perjanjian Kerja Sama antara Fakultas Sains, Teknologi, dan Pendidikan Universitas Tamansiswa Padang dan Fakultas Geografi Universitas Gadjah Mada Tentang Kerja Sama Dalam Melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi	Universitas Tamansiswa Padang
45	Perjanjian Kerja Sama antara Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang dan Fakultas Geografi Universitas Gadjah Mada tentang Kerja Sama dalam Melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi	UNP
46	Nota Kesepahaman Bersama antara Fakultas Geografi UGM dan PT Geo Indo Asia	PT Geo Indo Asia/Geohub
47	Nota Kesepahaman antara PT. Aruvana Virtual Semesta dan Fakultas Geografi Universitas Gadjah Mada	PT Aruvana



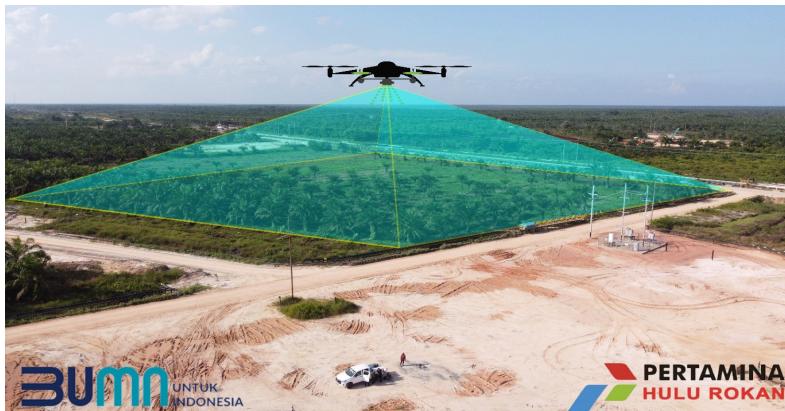
EXECUTIVE SUMMARY KERJA SAMA DALAM NEGERI TAHUN 2023

Mitra: PT Pertamina Hulu Rokan
Tahun Kerja Sama: 2023

Informasi geospasial adalah kebutuhan mutlak dalam perencanaan kegiatan pekerjaan Engineering dan Konstruksi baik itu berupa pemeliharaan, peningkatan, maupun pembangunan. Dalam proses perencanaan pekerjaan Engineering dan Konstruksi dibutuhkan informasi geospasial skala besar yang bisa menyajikan tutupan lahan detil, kondisi terrain permukaan bumi, arah aliran air dan slope. Informasi ini selanjutnya akan digunakan oleh para analis untuk melakukan perencanaan jalan yang efektif dan efisien. Saat ini, Pertamina Hulu Rokan, membutuhkan teknologi Drone LiDAR (Light Detection And Ranging) bersamaan dengan Digital Aerial Photography yang dapat memberi kecepatan waktu, akurasi, dan cost efective untuk akuisisi data 3D yang rapat di atas permukaan tanah.

Teknologi LIDAR UAV dilakukan dengan cara scanning di wilayah survei dari udara menggunakan wahana pesawat terbang (airborne) yang dipasangi alat Airborne LiDAR Scanner (ALS) dan foto udara digital, Point Density lidar minimal 100 point per meter persegi untuk point cloud raw DSM sehingga akan didapatkan data jutaan titik-titik yang mempunyai informasi 3D (XYZ) dan foto udara yang bisa digunakan untuk membuat peta topografi dengan skala 1:5000 sampai 1:1000 serta dengan resolusi spasial Ground Sample Distance (GSD) foto udara sampai dengan 10 cm.

Dengan kemampuan Drone LiDAR embeded Digital Aerial Photography akan bisa didapatkan informasi DSM, DEM, peta topografi, peta tutupan lahan dan informasi obstacle di lokasi pekerjaan secara sekaligus dalam waktu cepat dan teliti.



Mitra: Bappeda Kota Yogyakarta
Tahun Kerja Sama: 2023

Kerja sama antara Pemerintah Kota Yogyakarta dan Fakultas Geografi UGM melalui Bappeda Kota Yogyakarta telah menghasilkan dokumen Review dan Evaluasi Pengendalian Pelaksanaan RPJPD Kota Yogyakarta Tahun 2005-2025. Penyusunan dokumen ini dilaksanakan sebagai amanat dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 yang mengatur perlunya evaluasi pelaksanaan RPJPD setiap lima tahun untuk memastikan kesesuaian antara rencana dan capaian pembangunan daerah.

Evaluasi ini bertujuan menilai keberhasilan pelaksanaan arah pembangunan jangka panjang Kota Yogyakarta selama periode 2005-2025, termasuk efektivitas implementasi RPJMD per periode. Penilaian mencakup analisis terhadap indikator makro pembangunan seperti Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita, tingkat kemiskinan, serta daya saing daerah. Hasil evaluasi menunjukkan capaian yang positif dalam berbagai aspek pembangunan, meskipun masih terdapat tantangan seperti ketimpangan sosial ekonomi, peningkatan tekanan urbanisasi, dan isu-isu keberlanjutan lingkungan.

Temuan dari proses review ini menjadi dasar penting dalam perumusan RPJPD Kota Yogyakarta periode selanjutnya (2025-2045), agar tetap sejalan dengan arah kebijakan pembangunan nasional dan provinsi. Selain itu, dokumen ini memperkuat kesinambungan antara perencanaan jangka panjang, menengah, dan tahunan, serta keterpaduannya dengan sistem penganggaran daerah. Kolaborasi ini mencerminkan peran strategis akademisi dalam mendukung tata kelola pembangunan daerah berbasis data dan analisis spasial yang akurat.

Mitra: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
Tahun Kerja Sama: 2023

Fakultas Geografi UGM bekerja sama dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (KEMENDESA PDTT) dalam penyusunan dokumen Revitalisasi Kawasan Transmigrasi (RKT). Dokumen ini disusun untuk menilai pelaksanaan program revitalisasi kawasan transmigrasi yang merupakan bagian dari agenda strategis dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020–2024. Kerja sama ini menegaskan peran aktif Fakultas Geografi UGM dalam mendukung pengambilan kebijakan pembangunan wilayah melalui pendekatan geografis dan analisis spasial yang komprehensif.

Program RKT difokuskan pada pengembangan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN) yang terintegrasi, berkelanjutan, dan berbasis potensi lokal. Upaya ini diwujudkan melalui peningkatan infrastruktur dasar (seperti akses jalan, air bersih, dan irigasi), transformasi ekonomi lokal melalui penguatan BUMDesa Bersama, serta pengembangan komoditas unggulan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru. Hingga tahun 2023, program ini telah mencakup 63 kawasan prioritas dengan capaian nyata di bidang pembangunan fisik, kelembagaan, dan sosial ekonomi masyarakat transmigran.



Mitra: Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Daerah Istimewa Yogyakarta
Tahun Kerja Sama: 2023

Pemerintah Daerah DIY telah menetapkan Peraturan Daerah DIY Nomor 5 Tahun 2019 tentang RTRW DIY Tahun 2019-2039 (selanjutnya disebut "Perda DIY 5/2019") mengamanatkan untuk menyusun Peraturan Gubernur tentang pemanfaatan ruang kawasan sempadan pantai. Dalam Perda DIY Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Ruang Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten, kawasan sempadan pantai DIY termasuk dalam satuan ruang strategis yakni satuan ruang strategis pantai selatan Gunungkidul, satuan ruang strategis Samas-Parangtritis dan satuan ruang strategis pantai selatan Kulon Progo. Sementara itu, untuk pemanfaatan sempadan pantai, Pasal 33 ayat (2) Perda DIY 5/2019 tidak mengatur secara detail dan mengamanatkan Peraturan Gubernur DIY untuk mengatur mengenai hal tersebut. Oleh karena itu, pembentukan Peraturan Gubernur DIY tentang pemanfaatan kawasan sempadan pantai harus segera dikeluarkan untuk memperjelas ketentuan pemanfaatan sempadan pantai dalam Perda DIY 5/2019 dan memperlancar praktik pemanfaatan sempadan pantai di DIY. Apabila peraturan gubernur DIY tidak segera ditetapkan, konsekuensinya adalah akan semakin banyak peruntukan pemanfaatan ruang kawasan sempadan pantai yang tidak sesuai dengan koridor hukum yang berlaku, sehingga bersifat kontraproduktif dengan sifat kawasan sempadan pantai sebagai kawasan lindung yang harus dilindungi semaksimal mungkin.

Dalam rangka mengurangi kerusakan ekosistem kawasan sempadan pantai, pemanfaatan kawasan sempadan yang tepat dan sesuai dengan Visi Misi Gubernur dan Wakil Gubernur DIY 2022 – 2027 yakni "Mewujudkan Pancamulia Masyarakat Jogja melalui Reformasi Kelurahan, Pemberdayaan Kawasan Selatan, serta Pengembangan Budaya Inovasi dan Pemanfaatan Teknologi" dan misi Meningkatkan kualitas hidup-kehidupan- penghidupan, pembangunan yang inklusif dan pengembangan kebudayaan melalui reformasi kelurahan; Memberdayakan Kawasan Selatan dengan mengoptimalkan dukungan infrastruktur, peningkatan kapasitas SDM, dan perlindungan/pengelolaan sumber daya setempat; Meningkatkan budaya inovasi dan mengoptimalkan kemanfaatan kemajuan teknologi informasi; Melestarikan lingkungan dan warisan budaya melalui penataan ruang dan pertanahan yang lebih baik. Upaya mengalihkan wajah DIY menghadap ke selatan hendaknya menjadi titik balik perubahan arah pembangunan sekaligus gaya hidup manusia Jogja. Konsep dagang layar juga diusung sebagai jargon yang menambah khasanah pencapaian kesejahteraan warga DIY dari yang semula hanya among tani. Oleh karena itu, untuk mendukung terwujudnya visi misi di atas, Dinas Pertanahan dan Tata ruang DIY bekerja sama dengan Fakultas Geografi UGM melakukan penyusunan kajian instrumen teknis pemanfaatan ruang kawasan sempadan pantai sebagai pedoman teknis dalam pemanfaatan ruang di kawasan sempadan pantai selatan DIY.

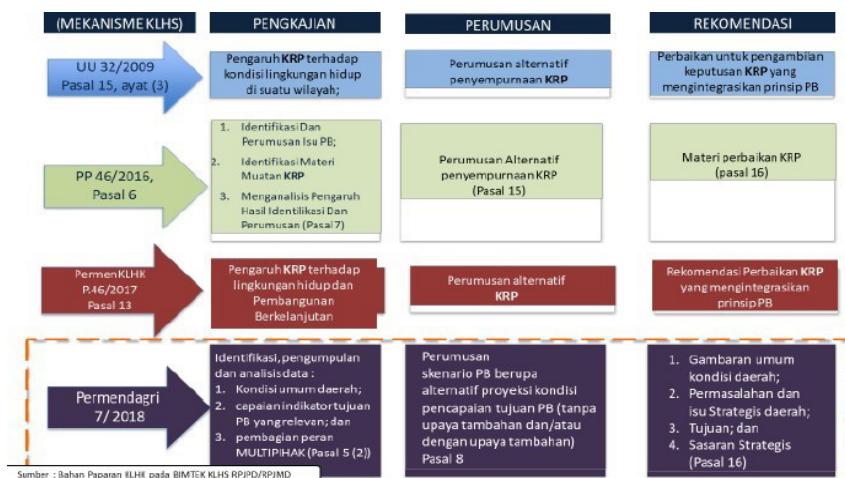
Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Madiun Tahun 2025-2045

Mitra: Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun
Tahun Kerja Sama: 2023

Tahapan penyelenggaraan KLHS berdasarkan Permen LHK No. 69 Tahun 2017 bersifat ex-ante atau berjalan bersamaan (paralel) dengan penyusunan dan/atau evaluasi KRP. Berdasarkan Permen LHK No. 69 Tahun 2017 KLHS wajib dilaksanakan kedalam penyusunan rencana pembangunan jangka panjang (RPJP) dan rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) Kabupaten/Kota. Berdasarkan arahan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 550/5112/Bangda proses pelaksanaan dan mekanisme penyusunan KLHS RPJMD maupun RPJPD dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dimana terdapat empat tahap dalam pelaksanaan, yaitu:

1. Pembuatan tim pembuat KLHS RPJPD
2. Pengkajian Pembangunan Berkelanjutan
3. Perumusan skenario pembangunan berkelanjutan
4. Penjaminan kualitas, pendokumentasian, dan validasi KLHS

Penjelasan singkat tentang mekanisme pembuatan dan pelaksanaan KLHS RPJPD berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 dapat dilihat pada bagan berikut ini.



Mitra: Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Barat
Tahun Kerja Sama: 2023

Pemerintah daerah wajib membuat rencana pembangunan jangka panjang daerah (RPJPD) 20 tahun yang memuat visi, misi, dan arah pembangunan daerah. Mengingat RPJPD Kabupaten Kutai Barat Tahun 2005-2025 akan segera berakhir, maka Pemerintah Kabupaten Kutai Barat mulai menyusun rancangan RPJPD 2025-2045 pada tahun 2023. Rencana awal dokumen RPJPD Kabupaten Kutai Barat tahun 2025-2045 menetapkan visi pembangunan daerah untuk "Mewujudkan Kutai Barat yang Mandiri, Unggul menuju Maju, Berdaya Saing dan Berkelanjutan" yang dilaksanakan melalui lima misi pembangunan daerah. Kelima misi tersebut akan dilaksanakan melalui 22 sasaran pokok yang diukur melalui empat elemen kebijakan dan 37 indikator.

Kerja sama Fakultas Geografi UGM dan Bappeda Kabupaten Kutai Barat menghasilkan rancangan awal RPJPD Kabupaten Kutai Barat untuk tahun 2025-2045. Dokumen ini menjadi rekomendasi kebijakan yang menjadi acuan untuk penyusunan RPJPD Kabupaten Kutai Barat Tahun 2025-2045.



Mitra: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangka Tengah
Tahun Kerja Sama: 2023

Sektor pertambangan Kabupaten Bangka Tengah tercatat menyumbang cukup besar terhadap PDRB ADHK Kabupaten Bangka Tengah tahun 2022, yaitu sebesar 1.362.908 juta rupiah (BPS Kabupaten Bangka Tengah, 2022). Tingginya pendapatan tersebut sangat berkaitan dengan potensi tambang timah di Kabupaten Bangka Tengah. Berdasarkan data sektor pertambangan Kabupaten Bangka Tengah, potensi tambang timah tersebut tersebar di seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Bangka Tengah, dengan produksi bijih timah mencapai 660,93 ton dan produksi logam timah sebesar 589,11 ton (Pemkab Kabupaten Bangka Tengah, 2022).

Berdasarkan potensi-potensi tersebut, Kabupaten Bangka Tengah memiliki peluang pengembangan ekonomi yang menjanjikan di masa yang akan datang, baik di sektor jasa, pertanian, maupun pertambangan. Namun, potensi tersebut juga disertai ancaman berupa degradasi dan kerusakan lingkungan apabila proses pengembangan wilayah tidak dilakukan secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Menyikapi hal tersebut, Kabupaten Bangka Tengah memerlukan instrumen lingkungan untuk menilai, memantau, mengontrol, dan mengevaluasi rencana serta pelaksanaan pembangunan di wilayahnya. Kajian Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup merupakan salah satu instrumen lingkungan yang diperlukan untuk mendampingi proses perencanaan dan pembangunan di Kabupaten Bangka Tengah. Hal ini sesuai dengan yang telah diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 yang menyebutkan bahwa pemanfaatan sumber daya alam harus dilaksanakan berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.

Secara teknis, penyusunan kajian daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup diatur secara jelas dalam SK Menteri LHK Nomor 297/MenLHK/Setjen/PLA.3/4/2019 tentang Daya Dukung dan Daya Tampung Air Nasional, yang mencakup penilaian skoring dan pemodelan, overlay, serta pengelasan pada indikator-indikator kajian, yaitu penggunaan lahan, komunitas vegetasi, dan ekoregion. Berdasarkan uraian di atas, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangka Tengah bermaksud melakukan Kajian Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup berbasis jasa lingkungan, sehingga dapat digunakan sebagai basis data lingkungan serta instrumen pengendalian dan pengelolaan lingkungan hidup, guna mendukung terciptanya pembangunan berkelanjutan yang menjadi bagian penting dalam pengarusutamaan pembangunan.

Mitra: Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam
Tahun Kerja Sama: 2023

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Empat Lawang menjalin kerja sama dengan Fakultas Geografi UGM dalam penyusunan masterplan smart city di Kabupaten Empat Lawang. Kabupaten Empat menjadi pintu gerbang bagi arus transportasi di Pulau Sumatera bagian selatan. Daerah ini menjadi penghubung antara Palembang dan Kota Bengkulu yang menjadi pusat kegiatan wilayah di Provinsi Sumatera Selatan. Kondisi geografis ini menjadi salah satu peluang dalam mengembangkan suatu wilayah. Sektor primer menjadi salah satu komoditas yang dikembangkan dan telah memberikan kontribusi besar bagi perekonomian daerah (sebesar 32,7% pada PRDB). Kopi menjadi komoditas dengan jumlah produksi paling tinggi selain karet, kelapa sawit, kelapa dan kakao. Pada Tahun 2019, produksi kopi mencapai 53.592 ton. Selain itu kondisi sumber daya alam yang dimanfaatkan untuk pertanian dan perkebunan, sektor pariwisata juga menjadi salah satu potensi yang seharusnya dapat dikembangkan. Berdasarkan data BPS Kabupaten Empat Lawang Tahun 2021, terdapat 39 objek wisata alam dan 18 objek wisata budaya yang tersebar di seluruh kecamatan di Kabupaten Empat Lawang. Kombinasi antara objek daya tarik wisata dengan atraksi keindahan alam sebagai supply tourism dengan posisi strategis sekaligus jalur transportasi penghubung pusat-pusat wilayah seharusnya dapat memberikan dampak yang besar bagi daerah. Namun, potensi ini masih belum dapat dikelola dengan baik sehingga belum memberikan dampak yang besar bagi masyarakat dan perekonomian daerah.

Executive Summary Masterplan Smart City Kabupaten Empat Lawang dapat dijadikan sebagai panduan implementasi Smart City di Kabupaten Empat Lawang. Dokumen ini diawali dengan latar belakang implementasi Smart City di Kabupaten Empat Lawang, Visi Smart City Kabupaten Empat Lawang yang sudah dirumuskan dan disepakati, strategi Smart City disetiap dimensi, serta quick win dan peta jalan setiap dimensi Smart City. Pelaksanaan program kerja pada buku ini masih sangat dimungkinkan untuk terjadi perubahan sesuai dengan situasi dan kondisi di lapangan.



Bimbingan Teknis Konsep Transpolitan dalam Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi

Mitra: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
Tahun Kerja Sama: 2023

Penyusunan Modul Bimbingan Teknis (Bimtek) ASN kerja sama antara Fakultas Geografo UGM dengan Direktorat Jendral Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi dapat terselesaikan dengan lancar dan tepat waktu.

Modul Bimbingan Teknis (Bimtek) ini akan memberikan penguatan kompetensi dan pengetahuan ASN bidang pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi transpolitan. Penguatan kompetensi dan pengetahuan ASN meliputi lima (5) dimensi yaitu dimensi ekonomi, dimensi social budaya, dimensi lingkungan, dimensi jejaring prasarana dan sarana, serta dimensi kelembagaan.

Bimtek ini diharapkan dapat memberikan angin segar bagi wilayah transmigrasi modern (transpolitan) untuk mempersiapkan sumberdaya manusia yang unggul, kreatif, inovatif dalam memanfaatkan sumberdaya alam yang ada dengan penerapan sistem teknologi yang mendukung.

RESTORASI TRANSMIGRASI DAN GERAKAN NASIONAL GREEN TRANSPOLITAN 4.0
(Prof. Dr. Suratman, M.Sc. - 2019)

"Soal Transmigrasi adalah Soal Mati-Hidup Kita (Bangsa Indonesia)"
Soekarno, 28 Desember 1964

"Indonesia tidak berasal hanya segera ditanggung di lair Pulau Jawa, dan untuk itu diperlukan peranlahan penduduk jawa sebagai tenaga kerjanya!"
Bung Hatta, 3 Februari 1946

INOVASI PEMBANGUNAN TRANSMIGRASI 4.0 (TRANSPOLITAN 4.0)

CAPAIAN

- 2 Ibukota Provinsi Baru
- 104 Ibukota Kabupaten Baru
- 1336 Desa definitif Baru
- 20 Kawasan Perkotaan Baru
- 336 Ibukota Kecamatan Baru

KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI

UNIVERSITAS GADJAH MADA

Mitra: Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Sukamara
Tahun Kerja Sama: 2023

Isu-isu strategis Kabupaten Sukamara dalam dokumen RPJPD 2025- 2045 merupakan rumusan dari berbagai permasalahan yang perlu ditangani serta sintesa isu-isu strategis dalam berbagai tingkatan dan pertimbangan, antara lain isu internasional, isu nasional yang tertuang dalam rancangan akhir RPJPN 2025-2045, isu provinsi sebagaimana tertuang dalam RPJPD Provinsi Kalimantan Tengah, dan RPD Kabupaten Sukamara serta dokumen KLHS dan RTRW. Isu Strategis Kabupaten Sukamara antara lain sebagai berikut.

1. Pembagian kewenangan antar hirarki wilayah
2. Penetapan batas wilayah
3. Aksesibilitas dan infrastruktur pelayanan dasar
4. Pertumbuhan ekonomi dan partisipasi masyarakat
5. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia
6. Kelestarian lingkungan dan tantangan perubahan iklim
7. Pemanfaatan teknologi informasi komunikasi (TIK) untuk Tata Kelola Pemerintahan yang baik (Good Governance)



Mitra: Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Kepulauan Yapen
Tahun Kerja Sama: 2023

Kabupaten Kepulauan Yapen, sebagai bagian integral dari Indonesia, menghadapi dinamika perkembangan wilayah yang semakin kompleks. Dengan keragaman geografis dan kekayaan alamnya, Kepulauan Yapen menjadi saksi dari berbagai perubahan yang memengaruhi kehidupan masyarakat dan lingkungan sekitarnya.

1. Kekayaan Alam dan Keragaman Ekosistem: Kepulauan Yapen dikenal akan kekayaan alamnya, termasuk hutan tropis, pantai yang indah, serta keanekaragaman hayati. Keragaman ekosistem ini menjadi landasan bagi kehidupan masyarakat lokal, yang sebagian besar bergantung pada sektor pertanian, perikanan, dan kehutanan.
2. Pertumbuhan Penduduk: Seperti banyak daerah di Indonesia, Kabupaten Kepulauan Yapen juga menghadapi tantangan pertumbuhan penduduk dan urbanisasi. Peningkatan jumlah penduduk dan pergeseran menuju kehidupan perkotaan menimbulkan tekanan pada sumber daya alam dan
3. Tantangan Lingkungan dan Keberlanjutan: Pemanasan global, perubahan iklim, dan degradasi lingkungan merupakan tantangan nyata yang perlu dihadapi. Dampak perubahan ini tidak hanya terasa pada tingkat lokal tetapi juga berpotensi mengancam keberlanjutan ekosistem yang mendukung
4. Peran RTRW dalam Pembangunan: Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dianggap sebagai instrumen kunci dalam mengelola perkembangan wilayah. Namun, perlu dipahami bahwa implementasi RTRW harus sejalan dengan prinsip-prinsip keberlanjutan agar pembangunan dapat mencapai harmoni antara pertumbuhan ekonomi dan pelestarian
5. Pentingnya Evaluasi Lingkungan: Dalam menghadapi kompleksitas ini, Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) menjadi langkah kritis untuk mengevaluasi dampak RTRW terhadap lingkungan. Evaluasi ini tidak hanya untuk memitigasi dampak negatif tetapi juga untuk mengidentifikasi peluang pengembangan yang berkelanjutan.

Melalui pemahaman mendalam terhadap latar belakang ini, diharapkan KLHS RTRW Kabupaten Kepulauan Yapen dapat menjadi panduan yang efektif untuk mencapai keseimbangan antara pembangunan yang dinamis dan keberlanjutan lingkungan. Dengan meresapi esensi tantangan dan potensi wilayah, KLHS diharapkan mampu memberikan kontribusi positif bagi masa depan yang berkelanjutan di Kabupaten Kepulauan Yapen.

Mitra: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kediri
Tahun Kerja Sama: 2023

Kerja sama Pemerintah Daerah Kabupaten Kediri melalui Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kediri menghasilkan dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kediri Tahun 2025-2030. Dokumen ini disusun sesuai amanat peraturan perundang-undangan yang menekankan pentingnya memperhatikan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi dalam perencanaan pembangunan daerah. Tujuan utama dari KLHS ini adalah untuk mengidentifikasi dan menganalisis isu-isu strategis yang berpengaruh terhadap keberlanjutan pembangunan, serta memberikan rekomendasi agar kebijakan, rencana, dan program (KRP) daerah dapat mendukung tercapainya Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs).

Ruang lingkup kajian mencakup 17 tujuan SDGs dengan fokus pada integrasi prinsip keberlanjutan ke dalam RPJMD. Dalam proses penyusunan, KLHS mengidentifikasi sejumlah isu strategis seperti kemiskinan, pengelolaan sumber daya air, penurunan kualitas lingkungan, perubahan tata guna lahan, serta ketimpangan pembangunan antarwilayah. Metodologi yang digunakan dalam kajian ini meliputi analisis keterkaitan antar tujuan pembangunan, penilaian terhadap daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup (DDDTLH), serta identifikasi dampak potensial dari program pembangunan. Kajian dilakukan secara partisipatif melalui forum konsultasi publik untuk memastikan masukan dari berbagai pemangku kepentingan.

Hasil dari KLHS ini menghasilkan rekomendasi yang menekankan pentingnya integrasi indikator keberlanjutan dalam perencanaan sektoral, perlunya penguatan kelembagaan, serta peningkatan pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan daerah. Diharapkan, dokumen ini dapat menjadi instrumen pengendali dalam arah pembangunan Kabupaten Kediri menuju pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Mitra: Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian
Tahun Kerja Sama: 2023

Hasil kerja sama antara Direktorat Jenderal Perkebunan, Kementerian Pertanian, dan tim pemetaan dari Fakultas Geografi UGM. Tujuan dari kegiatan ini adalah membangun sistem perencanaan terintegrasi bagi komoditas perkebunan unggulan serta mendukung pembentukan badan usaha milik petani di berbagai daerah, yang sejalan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG's) khususnya SDG 2 tentang ketahanan pangan dan pertanian berkelanjutan. Selama tahun 2023, survei dilakukan dalam sembilan periode di beberapa lokasi seperti Kabupaten Bandung, Boyolali, Karanganyar, Sukoharjo, Kapuas, Pulang Pisau, Kediri, Garut, dan Humbang Hasundutan, dengan fokus pada komoditas kelapa genjah dan kopi.

Survei SiCanTik melibatkan dua kegiatan utama, yaitu pengamatan lapangan terhadap kondisi bibit dan kebun, serta wawancara dengan petani untuk mengetahui permasalahan dan kondisi kebun. Pendekatan dilakukan melalui kelompok tani dan desa, dan bila tidak berhasil, survei dilakukan secara door to door. Data yang dikumpulkan mencakup informasi petani, titik koordinat kebun, kondisi bibit, serta dokumentasi visual. Pengumpulan data dilakukan menggunakan aplikasi SiCanTik dan SWMaps. Setelah survei, data diproses melalui tahapan koreksi data tabular dan spasial menggunakan perangkat lunak seperti QGIS dan disimpan dalam sistem WebGIS yang terintegrasi dengan database server milik Direktorat Jenderal Perkebunan. Proses ini bertujuan memastikan akurasi dan integrasi data spasial dan tabular ke dalam sistem perencanaan berbasis teknologi informasi guna mendukung pengelolaan perkebunan yang berkelanjutan.



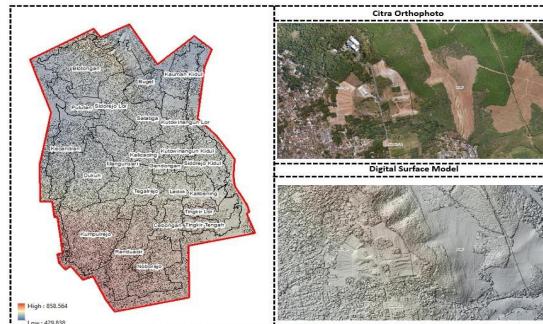
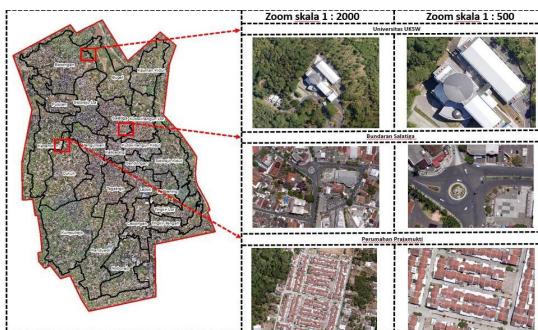
Pengadaan Foto Udara Kota Salatiga Menggunakan Pesawat Tanpa Awak Tahun 2023

Mitra: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Salatiga
Tahun Kerja Sama: 2023

Pemkot Salatiga melalui dinas DPUPR pada tahun anggaran 2023 memulai mengimplementasikan semangat yang diusung one map policy dengan mulai memperbaiki sumber data geospasial dasar yang menjadi tulang punggung berbagai kegiatan pemetaan di lingkungan pemerintahan Kota Salatiga. Upaya perbaikan tersebut dimulai dengan pengadaan foto udara untuk menghasilkan sumber data utama yang memiliki kualitas data yang diakui secara Nasional.

Manfaat dari adanya one map ialah untuk menciptakan sumber data yang konsisten serta menghindari tumpang tindih data yang diakibatkan oleh banyaknya pengguna data yang tidak terstruktur. Sumber data yang dihasilkan dapat digunakan untuk berbagai perencanaan dan analisis di berbagai sektor instansi pemerintahan maupun swasta. Salah satu sumber data one map dapat diperoleh dengan menggunakan data foto udara yang diperoleh dengan mengikuti standar yang berlaku.

Data hasil foto udara diharapkan mampu menjadi sumber data spasial utama Pemkot Salatiga dalam berbagai perencanaan di berbagai sektor dan mampu menekan berbagai permasalahan inkonsistensi dalam produksi data spasial dasar maupun tematik dalam tata kelola pemerintahan pada lingkup wilayah Kota Salatiga.



Mitra: Bapelitbang Kota Bontang
Tahun Kerja Sama: 2023

Informasi spasial saat ini sudah menjadi dasar untuk perencanaan pembangunan dan pengambil kebijakan sehingga kualitas dan kuantitas informasi spasial harus baik agar perencanaan pembangunan yang dihasilkan tepat sasaran. Namun kebutuhan data spasial yang konsisten, beragam dan tepat waktu saat ini masih menjadi kendala tersendiri. Dibutuhkan komitmen dari pemangku kebijakan untuk menyediakan anggaran, sumber daya manusia, infrastruktur dan pemanfaatan teknologi informasi.

Kemajuan teknologi yang mendukung pengumpulan, pengolahan, penyimpanan dan penyebaran informasi spasial merupakan solusi dari penyediaan data spasial saat ini. Hal ini menyebabkan berbagai kalangan baik swasta maupun pemerintah membangun infrastruktur spasial. Kesadaran tersebut menghasilkan ketersediaan data spasial yang banyak dan beragam dari berbagai sumber penyedia data spasial. Untuk itu diperlukan suatu mekanisme untuk mengatur pertukaran dan akses data spasial dari berbagai sumber.

Kegiatan penyediaan, penataan dan pengelolaan informasi geospasial (IG) merupakan amanat dari Undang-undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial. Pemerintah Daerah melaksanakan penyelenggaraan informasi geospasial sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangannya. Dalam rangka mendukung perencanaan pembangunan yang berkualitas dan pengendalian pembangunan yang efektif, perlu pengelolaan data yang akurat, mutakhir, terintegrasi, akuntabel, dinamis, handal, mudah diakses serta berkelanjutan. Selain itu juga dalam rangka mewujudkan keterpaduan perencanaan pembangunan antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah perlu didukung data yang dikelola secara seksama dan berkelanjutan.

Ketersediaan aplikasi Geoportal berbasis web sangat penting dalam mendukung Simpul Jaringan Informasi Geospasial Daerah (JIGD). Geoportal idealnya merupakan pintu menuju pustaka data spasial yang memungkinkan multi pengguna untuk berbagi pakai data spasial. Kondisi eksisting penyelenggaraan data dan informasi geospasial di Kota Bontang saat ini sudah dikelola dalam sistem Geoportal yang sudah dikembangkan sejak tahun 2013 sehingga perlu diadakan updating agar mengikuti perkembangan teknologi dan sesuai kebutuhan saat ini. Terkait dengan penyediaan infrastruktur geoportal, Pemerintah Kota Bontang menjalin kerja sama dengan Fakultas Geografi UGM untuk pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud.

Mitra: Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Kediri
Tahun Kerja Sama: 2023

Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJPD Kabupaten Kediri 2025–2045 memberikan evaluasi menyeluruh terhadap isu-isu pembangunan berkelanjutan di wilayah tersebut. Kajian ini bertujuan memastikan bahwa prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan terintegrasi dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD). Dalam prosesnya, KLHS menganalisis kondisi eksisting lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi, serta mengidentifikasi 8 isu strategis utama, termasuk pengelolaan sumber daya alam, ketahanan pangan, tata ruang, dan dampak perubahan iklim. Dokumen ini menyoroti perlunya integrasi lintas sektor dan peran penting pemangku kepentingan, serta merekomendasikan skenario pembangunan berkelanjutan yang mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan. Hasil KLHS ini menjadi dasar untuk penyusunan RPJPD yang lebih responsif terhadap tantangan jangka panjang, dengan arah kebijakan yang inklusif dan adaptif terhadap dinamika lingkungan dan sosial.

Mitra: Bappeda Kota Kediri
Tahun Kerja Sama: 2023

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) ini disusun untuk memastikan integrasi prinsip pembangunan berkelanjutan dalam RPJPD Kota Kediri 2025–2045. Penyusunan dokumen ini dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Kediri bekerja sama dengan Fakultas Geografi Universitas Gadjah Mada (UGM), yang berperan penting dalam analisis ilmiah dan evaluasi daya dukung lingkungan. KLHS mengidentifikasi 14 isu strategis, di antaranya ketimpangan wilayah, alih fungsi lahan, pengelolaan air dan sampah, serta kerentanan terhadap perubahan iklim. Kajian juga menilai keterkaitan program RPJPD dengan 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) dan mengevaluasi kondisi daya dukung lingkungan seperti kualitas udara, ketersediaan air, dan kapasitas lahan. Tiga skenario pembangunan dianalisis, dan KLHS merekomendasikan skenario Pembangunan Berkelanjutan sebagai arah kebijakan utama. Rekomendasi strategis mencakup penguatan tata ruang, ketahanan iklim, ekonomi hijau, dan pelibatan masyarakat dalam pembangunan

Mitra: Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota Salatiga
Tahun Kerja Sama: 2023

Pemerintah Kota Salatiga menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2025-2045 sebagai panduan arah pembangunan dua dekade ke depan. Dokumen ini dirancang untuk menjawab tantangan pembangunan daerah yang kompleks dan beragam, serta mendukung visi nasional Indonesia Emas 2045. Visi pembangunan yang diusung adalah: "Salatiga sebagai Kota Maju, Inklusif, dan Berkelanjutan Menuju Masyarakat Sejahtera 2045." RPJPD ini disusun berdasarkan evaluasi capaian pembangunan 2005-2025, identifikasi 19 permasalahan utama, dan perumusan 6 isu strategis seperti kemiskinan, kesenjangan, stunting, tata kelola, serta tantangan lingkungan dan digitalisasi.

Lima misi utama dan 4 tahapan arah kebijakan ditetapkan untuk memastikan transformasi yang terarah dan terukur. Pemerintah Kota Salatiga bekerja sama dengan Fakultas Geografi Universitas Gadjah Mada (UGM) dalam melakukan kajian teknis dan pemetaan strategis wilayah, termasuk integrasi isu lingkungan, tata ruang, dan perubahan iklim. Kolaborasi ini memperkuat dasar ilmiah penyusunan RPJPD dan memastikan perencanaan berbasis data dan daya dukung wilayah. RPJPD ini menjadi pedoman strategis untuk mewujudkan pembangunan inklusif, adaptif, dan berkelanjutan menuju Salatiga yang tangguh dan sejahtera.

Mitra: Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta
Tahun Kerja Sama: 2023

Pemerintah Kota Yogyakarta melalui Dinas Pertanahan dan Tata Ruang menyusun Draf Peraturan Walikota tentang penegasan batas kelurahan di empat kemantran—Mantrijeron, Wirobrajan, Jetis, dan Gondokusuman—untuk mendukung tertib administrasi wilayah, meningkatkan kepastian hukum, dan mencegah potensi konflik batas. Kegiatan ini dilaksanakan bekerja sama dengan Fakultas Geografi UGM, yang berperan sebagai mitra teknis dalam pemetaan, pengukuran pilar batas menggunakan metode GNSS (RTK-NTRIP), serta pengolahan data spasial berbasis Sistem Informasi Geografis (SIG). Selain itu, dilaksanakan juga forum diskusi kelompok (FGD) bersama perangkat kelurahan dan tokoh masyarakat untuk menyepakati batas wilayah. Hasil dari kegiatan ini adalah:

1. Peta batas RW, Kelurahan, dan Kemantran yang terverifikasi;
2. Data koordinat pilar batas yang akurat;
3. Draft Peraturan Walikota sebagai dasar hukum resmi penegasan batas wilayah.

Dokumen ini menjadi landasan penting dalam mendukung perencanaan, pelayanan publik, dan pengelolaan tata ruang yang lebih tertib dan berkelanjutan di Kota Yogyakarta.

Mitra: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lebak
Tahun Kerja Sama: 2023

Pemerintah Kabupaten Lebak menyusun Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) untuk mendukung penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Kota Baru Maja sebagai bagian dari proyek strategis nasional. Kajian ini dilaksanakan bekerja sama dengan Fakultas Geografi UGM, yang berperan dalam pengkajian teknis dan integrasi prinsip pembangunan berkelanjutan dalam perencanaan ruang.

KLHS ini menilai dampak potensial dari rencana pembangunan terhadap lingkungan hidup melalui identifikasi 12 isu pembangunan berkelanjutan, di antaranya:

1. Ledakan jumlah penduduk dan kebutuhan ruang,
2. Penambangan tanah dan pasir yang masif,
3. Ancaman bencana (banjir, kekeringan),
4. Krisis air bersih,
5. Pengelolaan sampah dan limbah yang belum optimal.

Dari hasil kajian, ditetapkan 5 isu prioritas utama, yang menjadi fokus mitigasi dan adaptasi kebijakan. Sejumlah kegiatan dalam RDTR, seperti pengembangan perumahan, jaringan jalan, kawasan industri, dan perdagangan, dianalisis terhadap daya dukung lingkungan dan risiko ekologis. KLHS merekomendasikan berbagai alternatif perbaikan seperti penyediaan ruang terbuka hijau (RTH), sistem drainase terpadu, pengendalian alih fungsi lahan, dan pengelolaan limbah yang terintegrasi. Kajian ini bertujuan menjamin bahwa arah pembangunan Kota Baru Maja tidak menurunkan kualitas lingkungan, serta mampu mengakomodasi pertumbuhan wilayah secara adil, adaptif, dan berkelanjutan.

Mitra: Bappeda Kota Yogyakarta
Tahun Kerja Sama: 2023

Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Kota Yogyakarta disusun untuk mengarahkan kebijakan kependudukan secara komprehensif selama 25 tahun ke depan. Dokumen ini merupakan pembaruan dari GDPK sebelumnya yang disusun pada tahun 2018, dan menjadi dasar penentuan arah, sasaran, dan strategi kebijakan pembangunan kependudukan berbasis data. Penyusunan GDPK ini dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta bekerja sama dengan Fakultas Geografi UGM, yang berperan dalam analisis kependudukan, pemetaan spasial, dan integrasi lima pilar pembangunan kependudukan, yaitu:

1. Pengendalian kuantitas penduduk,
2. Peningkatan kualitas penduduk,
3. Pembangunan keluarga,
4. Pengarahan persebaran dan mobilitas penduduk,
5. Penguatan data dan administrasi kependudukan.

Tujuan utama dari grand design ini adalah menciptakan penduduk yang tumbuh seimbang, berkualitas, sejahtera, dan memperkuat sistem data kependudukan yang andal untuk mendukung pembangunan berkelanjutan dan berkeadilan di Kota Yogyakarta. Melalui dokumen ini, pada akhirnya diperoleh hasil identifikasi berbagai tantangan kependudukan Kota Yogyakarta, termasuk fluktuasi laju pertumbuhan penduduk, meningkatnya proporsi lansia, stunting, pernikahan usia anak, hingga ketimpangan kualitas pendidikan dan kesehatan. Dokumen ini juga menyusun proyeksi penduduk hingga tahun 2045, menetapkan indikator kunci, serta merumuskan kebijakan dan roadmap lima tahunan.

Mitra: WWF Indonesia
Tahun Kerja Sama: 2023

Dunia sedang menghadapi tantangan iklim yang menjadi permasalahan serius bagi kita semua. Sebagian besar tantangan tersebut berkaitan langsung dengan aktivitas manusia, seperti industrialisasi tak terkendali, urbanisasi tanpa perencanaan yang matang, pengeboran tak terkontrol, penangkapan ikan berlebih, penggundulan hutan, penambangan terbuka dan aktivitas lainnya. Maka dari itu, manusia dihadapkan pada sebuah pilihan, yakni melanjutkan langkah yang tidak berkelanjutan atau berhenti dan mulai merenungkan. Berhenti dan belajar dari alam. Alam sangat berperan penting dalam segala perubahan serta permasalahan yang terjadi dibumi dengan menawarkan banyak solusi untuk mengurangi dampak bencana dan iklim. Terkhusus, krisis iklim yang tengah terjadi di seluruh dunia. 'Solusi Berbasis Alam' (NbS) adalah bagian penting untuk membangun ketangguhan rumah tangga dan masyarakat terhadap kejadian bencana yang terus meningkat di seluruh dunia.

Fakultas Geografi UGM bekerja sama dengan WWF Indonesia dalam menyusun sebuah modul edukatif Nature-based Solutions (Solusi Berbasis Alam). Kolaborasi ini menghasilkan materi pembelajaran komprehensif yang mencakup teori dan praktik dalam mengelola jasa lingkungan secara berkelanjutan melalui pendekatan berbasis ekosistem. Modul ini tidak hanya memperkenalkan konsep-konsep dasar NbS, tetapi juga menyajikan metode pemodelan spasial, analisis jasa ekosistem menggunakan perangkat lunak InVEST, serta studi kasus nyata dari berbagai daerah di Indonesia. Kerja sama ini diharapkan dapat menjadi sumber pengetahuan dan rujukan strategis bagi para akademisi, praktisi, dan pengambil kebijakan dalam merancang solusi iklim yang lebih inklusif dan berorientasi pada keberlanjutan lingkungan.



Mitra: GIZ (The Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit)
Tahun Kerja Sama: 2023

Fakultas Geografi UGM menjalin kerja sama strategis dengan GIZ melalui program Support to the Peatland Management and Rehabilitation (SUPA). Kolaborasi ini berfokus pada pengembangan kapasitas teknis dalam pemantauan lahan gambut tropis dengan pendekatan berbasis teknologi Sistem Informasi Geografis (GIS) dan Penginderaan Jauh (Remote Sensing).

Dalam kerja sama ini, Fakultas Geografi UGM melalui Pusat Pengembangan dan Informasi Spasial (PUSPICS) merancang dan menyelenggarakan program pelatihan intensif bagi tim teknis SUPA dan mitra-mitra daerah di Aceh. Pelatihan ini bertujuan meningkatkan pemahaman peserta terhadap metodologi pemetaan lahan gambut yang sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI) No. 7925 Tahun 2019, termasuk aplikasi praktis seperti deteksi kebakaran lahan, estimasi stok karbon, perubahan tutupan lahan, serta pemodelan hidrologi gambut.

Kolaborasi ini tidak hanya menghasilkan peningkatan kapasitas teknis peserta, tetapi juga memperkuat pemanfaatan ilmu geospasial dalam mendukung kebijakan restorasi gambut nasional dan mitigasi perubahan iklim. Ke depan, pelatihan lanjutan dengan materi lebih mendalam seperti analisis data hiperspektral, pemodelan 3D, dan pemanfaatan kecerdasan buatan untuk pemantauan gambut menjadi opsi pengembangan program bersama antara UGM dan GIZ.

Mitra: Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta
Tahun Kerja Sama: 2023

Fakultas Geografi Universitas Gadjah Mada menjalin kerja sama dengan Dinas PUPR Kota Yogyakarta dalam kegiatan Pendataan Penerangan Jalan Umum (PJU) Tahap V. Kolaborasi ini bertujuan untuk menghasilkan basis data spasial yang akurat dan terkini mengenai kondisi PJU di seluruh wilayah Kota Yogyakarta, mencakup data KWH meter, tiang lampu, dan unit lampu penerangan. Pendataan dilakukan melalui survei lapangan yang didukung dengan teknologi Sistem Informasi Geografis (SIG), dan hasilnya divisualisasikan dalam bentuk peta cetak dan digital, serta sistem informasi berbasis web dan Android. Produk akhir berupa Spatial Information System PJU diharapkan dapat digunakan sebagai dasar perencanaan, pemeliharaan, dan pengambilan kebijakan yang lebih efisien dan transparan dalam pengelolaan infrastruktur penerangan jalan kota. Kerja sama ini menunjukkan kontribusi nyata dunia akademik dalam mendukung pembangunan kota berbasis data dan teknologi geospasial yang adaptif terhadap kebutuhan masyarakat.



Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Seruyan Tahun 2025-2045

Mitra: Bappeda Kabupaten Seruyan
Tahun Kerja Sama: 2023

Fakultas Geografi Universitas Gadjah Mada bekerja sama dengan Bappeda Kabupaten Seruyan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Seruyan Tahun 2025-2045. Kolaborasi ini bertujuan merumuskan arah pembangunan jangka panjang yang strategis dan berkelanjutan dengan mempertimbangkan kondisi aktual wilayah, proyeksi masa depan, serta isu-isu global, nasional, dan regional. Dalam prosesnya, Fakultas Geografi UGM berperan dalam memberikan dukungan teknis, kajian spasial, serta analisis indikator makro pembangunan yang komprehensif untuk memastikan bahwa visi "Kabupaten Seruyan sebagai Simpul Pembangunan Wilayah yang Tumbuh dengan Tangguh, Mandiri, dan Berkelanjutan" dapat diwujudkan secara terukur. Dokumen hasil kerja sama ini memuat visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan yang menjadi landasan penting bagi perencanaan lintas sektor di Kabupaten Seruyan selama dua dekade mendatang.

Mitra: Bapelitbang Kota Salatiga
Tahun Kerja Sama: 2023

Fakultas Geografi UGM menjalin kerja sama dengan Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (Bapelitbang) Kota Salatiga melalui kegiatan evaluasi dan penyusunan model kemitraan Program "Super Tangguh" tahun 2023. Program ini merupakan inovasi Pemerintah Kota Salatiga yang mengedepankan pendekatan "Satu Perangkat Daerah Bertanggung Jawab Penuh" sebagai upaya percepatan penurunan angka kemiskinan dengan intervensi langsung di tingkat kelurahan. Setiap organisasi perangkat daerah (OPD) didorong untuk mengambil peran aktif dalam mendampingi satu kelurahan binaan, dengan menyusun program yang selaras dengan isu lokal dan tugas pokok fungsinya.

Kerja sama ini bertujuan tidak hanya untuk mengevaluasi pelaksanaan Program "Super Tangguh" dari aspek efektivitas, efisiensi, dan kebermanfaatan, tetapi juga untuk mengidentifikasi pola dan model kemitraan multi-aktor yang paling sesuai diterapkan dalam konteks Kota Salatiga. Evaluasi dilakukan secara komprehensif meliputi ketepatan sasaran, ketepatan penggunaan (tepat guna), ketepatan waktu, hingga pemetaan aktor non-pemerintah yang berperan dalam pelaksanaan program—seperti masyarakat sipil, dunia usaha, lembaga sosial, dan akademisi. Dari hasil evaluasi tersebut, Fakultas Geografi UGM merumuskan model kemitraan yang lebih terstruktur dan adaptif terhadap tantangan di lapangan.

Hasil akhir kerja sama ini berupa dokumen evaluasi dan model kemitraan yang tidak hanya menjadi alat refleksi pelaksanaan tahun pertama Program "Super Tangguh", tetapi juga menjadi referensi penting untuk pengembangan kebijakan dan pelaksanaan program kemiskinan di tahun-tahun mendatang. Dengan pendekatan ilmiah, partisipatif, dan kontekstual yang diterapkan dalam proses penyusunan, dokumen ini memperkuat kapasitas kelembagaan Kota Salatiga dalam menata strategi pembangunan sosial yang lebih adil dan berkelanjutan. Kerja sama ini juga mencerminkan peran aktif dunia akademik dalam membangun jembatan antara kebijakan, data, dan praktik di tingkat lokal.

Mitra: Pemerintah Kota Bontang
Tahun Kerja Sama: 2023

Fakultas Geografi UGM bekerja sama dengan Pemerintah Kota Bontang dalam kegiatan pelatihan dan pengembangan sistem Geoportal Kota Bontang tahun 2023. Kerja sama ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas teknis aparatur pemerintah daerah, khususnya dalam pengelolaan dan pemanfaatan data spasial melalui platform geoportal berbasis web. Dalam kegiatan ini, Fakultas Geografi UGM menyusun modul pelatihan komprehensif yang mencakup penggunaan perangkat lunak QGIS untuk pemetaan dasar, pengelolaan atribut, simbologi, hingga pembuatan layout peta, serta pengoperasian sistem geoportal baik dari sisi pengguna (front-end) maupun administrator (back-end).

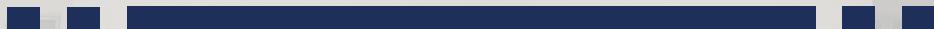
Geoportal Kota Bontang dikembangkan sebagai platform terpadu yang memungkinkan penyimpanan, pengelolaan, visualisasi, dan distribusi data spasial dalam berbagai format. Melalui pelatihan ini, peserta difasilitasi untuk memahami cara mengunggah layer peta, mengatur metadata dan hak akses, menyusun peta tematik, hingga membangun geostory dan dashboard interaktif. Hasil dari kerja sama ini tidak hanya meningkatkan keterampilan teknis aparatur, tetapi juga memperkuat tata kelola informasi spasial di Kota Bontang yang mendukung pengambilan keputusan pembangunan berbasis bukti, transparan, dan partisipatif.





**UNIVERSITAS GADJAH MADA
FAKULTAS GEOGRAFI**

**DAFTAR
KERJA SAMA DALAM NEGERI
TAHUN 2024**



AUDITORIUM MERAPI

DAFTAR KERJA SAMA DALAM NEGERI

FAKULTAS GEOGRAFI TAHUN 2024

No	Judul	Mitra
1	Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kutai Barat – Swakelola Tipe I	Bappeda Kabupaten Kutai Barat
2	Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (KLHS RPJMD) Kota Madiun Tahun 2025-2029	DLH Kota Madiun
3	Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029 Kota Kediri	DLH Kota Kediri
4	Penguatan Solusi berbasis Pendekatan Ekosistem bagi Pencaapaian FOLU Net Sink 2030 Indonesia: (Advocating Ecosystem based Approach (EbA) for Achieving FOLU Net Sink 2030 Indonesia)	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
5	Rancangan Rencana Pembangunan Daerah Jangka Panjang (RPJPD) Kabupaten Sukamara Tahun 2025-2045 dan Rancangan Akhir RPJPD Kabupaten Sukamara Tahun 2025-2045	Bappeda Kabupaten Sukamara
6	Teknokratik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029	Bappeda Kabupaten Sukamara
7	Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sukamara Tahun 2025	Bappeda Kabupaten Sukamara
8	Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sukamara Tahun 2023	Bappeda Kabupaten Sukamara
9	Evaluasi RPJMD Tahun 2018-2023	Bappeda Kabupaten Sukamara
10	Rancangan Akhir RPJPD Kabupaten Seruyan Tahun 2025-2045	Bappeda Kabupaten Seruyan
11	Rancangan Teknokratik RPJMD Kabupaten Seruyan Tahun 2025-2030	Bappeda Kabupaten Seruyan
12	Penyempurnaan Penyusunan Basis Data Spasial Perkebunan Berkelaanjutan Menggunakan Aplikasi Sistem Informasi Perencanaan Terintegrasi Perkebunan (SICANTIK)	Kementerian Pertanian
13	Pelatihan Perencanaan Infrastruktur yang Mendorong Penerapan Solusi Berbasis Alam	WWF Indonesia
14	Kegiatan Analisis Tematik Derivatif Berbasis AI Dalam Mendukung Hilirisasi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Tahun Anggaran 2024	Kementerian ATR/BPN
15	Penyusunan Dokumen Inventarisasi Keragaman Geologi (Geodiversity), Pengusulan Penetapan Warisan Geologi (Geoheritage), dan Pemanfaatan Situs Warisan Geologi	Dinas ESDM Provinsi Kalimantan Utara
16	Kajian Identifikasi Potensi Sumber Daya Air Masyarakat Perkotaan Kabupaten Banggai	BRIDA Kabupaten Banggai
17	Kegiatan Bimbingan Teknis Pengelolaan Lahan untuk Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Kementerian Desa PDTT
18	Penyusunan Rencana Pembangunan Kawasan Perkotaan Baru di Kawasan Transmigrasi Telang, Kab. Banyuasin Sumatera Selatan Dalam Rangka Mendukung Konsep Transpolitan	Kementerian Desa PDTT
19	Pemetaan Nilai/Norma Sosial dan Budaya di Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara yang Sudah Menjadi Bagian dari IKN	BRIDA Kabupaten Kutai Kartanegara
20	Kajian Determinan Kemiskinan dan Penanggulangannya Di Kabupaten Kutai Kartanegara	BRIDA Kabupaten Kutai Kartanegara
21	Penyusunan Pengawasan Pemanfaatan Ruang	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta
22	Penyusunan Draft Peraturan Walikota Tentang Penegasan Batas Kelurahan di Tujuh Kemantren (Gondomanan, Tegalrejo, Gedongtengen, Ngampilan, Kraton, Pakualaman, dan Danurejan) Kota Yogyakarta	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta
23	Penyusunan RPPLH Kota Yogyakarta	Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta
24	Digital Mapping untuk Tata Kelola Lahan Sawit Geo-AI dan Sistem Penginderaan Jauh Multi Spektral Untuk Early Detection Penyakit Kelapa Sawit dan Estimasi Produksi Sawit : Studi Kasus pada PTPN IV	PT Perkebunan Nusantara

DAFTAR KERJA SAMA DALAM NEGERI

FAKULTAS GEOGRAFI TAHUN 2024

No	Judul	Mitra
25	Survei Hidrologi, Hidrogeologi, dan Geodiversitas Karst di IUP PT. Sumber Daya Energi	PT Sumber Daya Energi
26	Kajian Analisis Risiko Pengembangan Transmigrasi Swakarsa Mandiri (Tsm) Milenial di Kawasan Transmigrasi Telang, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan	Kementerian Desa PDTT
27	Penyusunan Dokumen Perencanaan Penanggulangan Bencana Daerah	BPBD Kota Salatiga
28	Pemetaan Lahan Pertanian, Fase Tanam, dan Jenis Komoditas Strategis Multitemporal Menggunakan Teknologi Geospasial	IForum Riset Indonesia (FRI)
29	Penyelenggaraan Program Pendidikan Pascasarjana (S2 Dan S3) di Fakultas Geografi UGM Tahun 2022	KLHK
30	Program Magang Kampus Merdeka di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta	Bappeda Kota Yogyakarta
31	Program Magang Kampus Merdeka di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Salatiga	Bappeda Kota Salatiga
32	Perjanjian Kerja Sama antara Fakultas Geografi Universitas Muhammadiyah Surakarta dan Fakultas Geografi Universitas Gadjah Mada tentang Kerja Sama Dalam Melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi	Universitas Muhammadiyah Surakarta
33	Pengelolaan Dan Penyusunan Informasi Geospasial Tematik Ekosistem Kawasan Konservasi, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Kementerian Kelautan dan Perikanan
34	Pengkajian, Penelitian, dan Evaluasi Bidang Pengendalian Penemaran Air	KLHK
35	Kerja Sama Bidang Tridharma Perguruan Tinggi Dalam Rangka Pengembangan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi - Implementasi Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM)	BBWS Serayu Opak
36	Kerja Sama Dalam Melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi	Universitas Bojonegoro
37	Konsorsium Perjanjian Kerja Sama UGM, KKP, BIG, BRIN dan UNHAS tentang National Seagrass Mapping Framework Development and Implementation Project in Indonesia	Konsorsium Packard
38	Penyusunan Kajian Ketersediaan Air Tanah Untuk Irrigasi Pada Sentra Hortikultura di Kabupaten Kutai Timur	Dinas Ketahanan Pangan Kab. Kutai Timur
39	Analisis Spasial Karakteristik Ekosistem Gambut dalam Penetapan Fungsi Ekosistem Gambut (Skala 1:50.000) dan Pengembangan Model Prediksi Tinggi Muka Air Tanah (TMAT) untuk Menghitung Gas Rumah Kaca (GRK)	KLHK
40	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2024	Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam
41	Studi Pemetaan Lahan Dan Pemilihan Bahan Baku Untuk Proses Produksi Bioetanol Berbasis Gula/Pati NonTebu	PT Pertamina Persero
42	Perjanjian Kerja Sama antara Universitas Gadjah Mada dan Pramesti Wulandari tentang Sewa Menyewa Lapak di Kantin Geografi	Pramesti Wulandari, Kartika Pratiwi
43	Perjanjian Kerja Sama antara Universitas Gadjah Mada dan Muhammad Ali AR tentang Sewa Menyewa Lapak di Kantin Geografi	Muhammad Ali AR
44	Perjanjian Kerja Sama antara Universitas Gadjah Mada dan Widiatmoko tentang Sewa Menyewa Lapak di Kantin Geografi	Widiatmoko
45	Perjanjian Kerja Sama antara Universitas Gadjah Mada dan Albudiani tentang Sewa Menyewa Lapak di Kantin Geografi	Albudiani
46	Perjanjian Kerja Sama antara Universitas Gadjah Mada dan Dharmawita Persatuan Unsur Pelaksana Fakultas Geografi tentang Sewa Menyewa Lapak Di Kantin Geografi	Dharma Wanita Persatuan Unsur Pelaksana Fakultas Geografi

EXECUTIVE SUMMARY KERJA SAMA DALAM NEGERI TAHUN 2024

Mitra: Bappeda Kabupaten Kutai Barat
Tahun Kerja Sama: 2024

Bappeda Kabupaten Kutai Barat dan Fakultas Geografi UGM menyusun dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kutai Barat Tahun 2025–2045. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kutai Barat Tahun 2025–2045 disusun sebagai kelanjutan dari RPJPD 2005–2025 yang akan segera berakhir. Tujuan utama dari dokumen ini adalah untuk memberikan arah pembangunan jangka panjang yang terstruktur, terukur, dan selaras dengan visi nasional Indonesia Emas 2045. Visi yang diusung adalah "Tanaa Purai Ngeriman sebagai Agroindustri yang Maju, Mandiri, dan Berkelanjutan." Untuk mendukung pencapaian visi ini, delapan misi pembangunan daerah telah dirumuskan dan disesuaikan dengan tantangan serta peluang pembangunan, baik di tingkat lokal maupun nasional.

Evaluasi atas kinerja pembangunan selama periode 2005–2025 menunjukkan adanya capaian positif seperti peningkatan jaringan jalan dan Indeks Pembangunan Gender. Namun demikian, masih terdapat berbagai tantangan yang harus diatasi, seperti terbatasnya akses air minum, tingginya angka kemiskinan dan pengangguran, pertumbuhan ekonomi yang lambat, serta rendahnya kualitas lingkungan hidup. Oleh karena itu, RPJPD 2025–2045 menetapkan isu-isu strategis utama yang mencakup kebutuhan transformasi ekonomi berbasis agroindustri, penguatan ketahanan pangan, pencegahan alih fungsi lahan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta kesiapsiagaan menghadapi bencana dan perubahan iklim.

Salah satu hasil strategis utama dari perencanaan ini adalah penetapan pengembangan Kawasan Agroindustri Terpadu yang berpusat di Kecamatan Bongan sebagai penggerak utama transformasi ekonomi. Kawasan ini akan mengintegrasikan sektor pertanian secara luas, termasuk perkebunan, peternakan, dan perikanan, untuk menciptakan rantai produksi yang berkelanjutan dan saling melengkapi. Dalam mendukung implementasi visi dan misi tersebut, arah kebijakan pembangunan dibagi dalam empat tahapan lima tahunan yang masing-masing memiliki tema pembangunan spesifik dan indikator pencapaian pada tingkat dampak (impact), serta mengacu pada RPJPN dan RPJPD Provinsi Kalimantan Timur.

Secara keseluruhan, RPJPD Kabupaten Kutai Barat 2025–2045 memberikan kerangka strategis yang bertujuan untuk mewujudkan pembangunan daerah yang inklusif, berkelanjutan, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Keberhasilan pelaksanaan RPJPD ini sangat bergantung pada sinergi yang kuat antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta dalam mengawal transformasi pembangunan menuju tahun 2045.

Mitra: Bappeda Kota Madiun
Tahun Kerja Sama: 2024

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) untuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Madiun Tahun 2025–2029 disusun untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan terintegrasi dalam proses perencanaan daerah. Tujuan utama dari KLHS ini adalah mengidentifikasi isu-isu strategis pembangunan berkelanjutan, mengevaluasi capaian indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB), serta memberikan rekomendasi kebijakan yang relevan dan berbasis daya dukung serta daya tampung lingkungan. Penyusunan KLHS ini juga menjadi dasar dalam pengambilan keputusan pembangunan agar berdampak minimal terhadap lingkungan hidup dan mendukung pencapaian target-target TPB yang relevan.

Hasil kajian menunjukkan bahwa dari 203 indikator TPB yang relevan di Kota Madiun, sebanyak 136 indikator (67%) telah mencapai target nasional, 18 indikator (8,87%) belum tercapai, 5 indikator (2,46%) belum dilaksanakan, dan 44 indikator (21,67%) belum memiliki data. Capaian terbaik berada pada pilar hukum dan tata kelola serta pilar sosial, sementara tantangan besar masih terdapat pada aspek lingkungan. Selain itu, hasil konsultasi publik dan analisis teknis berhasil merumuskan tujuh isu strategis utama yang perlu ditangani selama periode RPJMD 2025–2029, antara lain: peningkatan kualitas SDM, stabilitas ekonomi, mitigasi perubahan iklim, pengelolaan pencemaran, pelestarian ruang terbuka hijau dan keanekaragaman hayati, keamanan kota, serta tata kelola pemerintahan yang baik. Semua isu ini selaras dengan prioritas jangka panjang dalam RPJPD Kota Madiun 2025–2045. KLHS ini menjadi landasan penting dalam menyusun arah kebijakan pembangunan jangka menengah yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan keberlanjutan lingkungan.

Mitra: Bappeda Kota Kediri
Tahun Kerja Sama: 2024

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) untuk RPJMD Kota Kediri 2025–2029 disusun sebagai upaya untuk memastikan integrasi prinsip pembangunan berkelanjutan ke dalam dokumen perencanaan jangka menengah daerah. Tujuan utamanya adalah menganalisis capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB), mengevaluasi daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup (DDDTLH), serta merumuskan rekomendasi kebijakan strategis yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. KLHS ini dilaksanakan melalui proses yang partisipatif dan transparan, melibatkan pemerintah, masyarakat, akademisi, pelaku usaha, dan organisasi masyarakat sipil.

Berdasarkan hasil kajian, capaian indikator TPB di Kota Kediri masih menghadapi tantangan. Dari ratusan indikator yang dianalisis, sebagian besar telah dilaksanakan namun belum mencapai target nasional. Isu-isu strategis yang diidentifikasi meliputi pengelolaan air permukiman, konservasi lahan pertanian, mitigasi perubahan iklim, peningkatan kualitas lingkungan permukiman, serta penguatan tata kelola pemerintahan yang akuntabel. Hasil analisis daya dukung lingkungan menunjukkan bahwa kapasitas ketersediaan air pada tahun 2023 sebesar \pm 59,5 juta m³/tahun, dengan prediksi akan mengalami tekanan lebih besar pada tahun-tahun mendatang akibat urbanisasi dan alih fungsi lahan.

Sebagai hasil akhir, KLHS RPJMD Kota Kediri menghasilkan skenario pembangunan berkelanjutan yang terbagi menjadi dua pendekatan: tanpa upaya tambahan dan dengan upaya tambahan. Berdasarkan pendekatan ini, disusunlah rekomendasi program prioritas, baik dari pemerintah maupun mitra pembangunan, yang selaras dengan upaya pencapaian target TPB dan mempertimbangkan keterbatasan lingkungan. KLHS ini tidak hanya menjadi dokumen pendukung RPJMD, tetapi juga instrumen penting dalam menjamin bahwa arah pembangunan Kota Kediri ke depan tetap seimbang antara kebutuhan sosial, ekonomi, dan kelestarian lingkungan hidup.

Mitra: Bappeda Kabupaten Sukamara
Tahun Kerja Sama: 2024

RPJPD Kabupaten Sukamara Tahun 2025-2045 disusun sebagai kelanjutan dari periode sebelumnya untuk memberikan arah pembangunan jangka panjang yang berkelanjutan, terintegrasi, dan inklusif. Visi pembangunan daerah adalah "Sukamara Kota Permata Berkilau: Sukamara Kota Permai yang Sejahtera, Berkelanjutan, Berintegritas, Inklusif, dan Maju", yang diwujudkan melalui 8 misi pembangunan, 17 arah pembangunan, dan 45 indikator utama pembangunan. Evaluasi terhadap RPJPD 2005-2025 menunjukkan adanya capaian positif di sektor ekonomi dan pembangunan manusia, tetapi juga mengungkap sejumlah tantangan seperti kemiskinan, kesenjangan pendapatan, infrastruktur dasar yang belum optimal, serta kerusakan lingkungan. Permasalahan ini kemudian dirumuskan menjadi isu-isu strategis daerah yang mencakup tata kelola pemerintahan, transformasi ekonomi, aksesibilitas layanan dasar, hingga ketahanan terhadap bencana dan perubahan iklim.

RPJPD ini merancang pembangunan dalam 4 tahapan lima tahunan, dimulai dari penguatan fondasi pembangunan hingga menuju Sukamara sebagai "Kota Permata Berkilau" pada tahun 2045. Setiap tahapan difokuskan pada penguatan sektor-sektor kunci seperti pendidikan, kesehatan, ekonomi hijau, transformasi digital, dan tata kelola pemerintahan. Arah pembangunan ini diturunkan ke dalam indikator yang terukur, seperti peningkatan usia harapan hidup, penurunan angka stunting dan kemiskinan, peningkatan partisipasi pendidikan tinggi, serta penguatan sektor industri dan perikanan. RPJPD ini menjadi dokumen strategis untuk mengarahkan pembangunan Sukamara menuju kesejahteraan berkelanjutan dan daya saing daerah di masa depan.

Mitra: Bappeda Kabupaten Sukamara
Tahun Kerja Sama: 2024

Rancangan Teknokratik RPJMD Kabupaten Sukamara 2025-2029 disusun sebagai langkah awal pelaksanaan visi jangka panjang dalam RPJPD 2025-2045. Dokumen ini disiapkan sebelum kepala daerah terpilih dan bertujuan memberikan arah kebijakan pembangunan jangka menengah berdasarkan pendekatan teknokratik. Evaluasi terhadap RPJMD 2018-2023 menunjukkan bahwa 60,54% indikator kinerja utama telah tercapai, meskipun masih terdapat tantangan seperti ketimpangan ekonomi, pengangguran, dan rendahnya kontribusi sektor industri terhadap PDRB. Isu-isu strategis yang menjadi fokus pembangunan lima tahun ke depan antara lain peningkatan daya saing produk lokal, kolaborasi lintas sektor, penguatan kapasitas masyarakat, pelestarian lingkungan, serta reformasi tata kelola dan birokrasi digital.

RPJMD ini mendukung pencapaian sasaran pokok tahap pertama dari RPJPD, dengan menekankan penguatan SDM, ekonomi inklusif, transformasi digital, dan perlindungan sosial. Beberapa indikator utama yang ditargetkan antara lain peningkatan PDRB per kapita, penurunan tingkat kemiskinan dan stunting, serta peningkatan kualitas pendidikan, layanan kesehatan, dan reformasi birokrasi. Selain itu, disusun pula intervensi program strategis di sektor-sektor unggulan seperti pengembangan produk kelapa sawit, perikanan, wisata kuliner, serta program konektivitas desa-kota. Keseluruhan RPJMD ini dirancang untuk memastikan landasan yang kuat bagi transformasi berkelanjutan dan pembangunan yang merata di Kabupaten Sukamara.

Mitra: Bappeda Kabupaten Sukamara
Tahun Kerja Sama: 2024

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sukamara Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan tahunan yang disusun untuk menjabarkan arah pembangunan tahun kedua dalam RPD 2024–2026. Tujuan utama penyusunan RKPD ini adalah mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui diversifikasi potensi daerah yang berdaya saing dan didukung oleh pelayanan infrastruktur yang merata dan berkelanjutan. Proses penyusunannya melibatkan pendekatan teknokratik, partisipatif, atas-bawah dan bawah-atas, serta mengacu pada dokumen perencanaan yang lebih tinggi seperti RPJPD Provinsi dan RKP Nasional.

RKPD 2025 menetapkan arah kebijakan pembangunan daerah dengan fokus pada pengentasan kemiskinan ekstrem, penurunan stunting, pengendalian inflasi, serta pemenuhan standar pelayanan minimal. Total pagu anggaran untuk seluruh organisasi perangkat daerah sebesar Rp847,99 miliar, dengan alokasi terbesar pada sektor pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, dan tata ruang. Pemerintah juga menargetkan pencapaian indikator kinerja utama seperti pertumbuhan ekonomi 5,8%, angka kemiskinan turun ke 3,10%, dan peningkatan IPM menjadi 71,55. Selain itu, 144 indikator kinerja daerah ditetapkan untuk memastikan pelaksanaan program pembangunan lintas sektor, termasuk pendidikan, kesehatan, lingkungan, tata ruang, serta pemberdayaan ekonomi lokal berbasis UMKM dan sumber daya alam berkelanjutan.

Mitra: Bappeda Kabupaten Sukamara
Tahun Kerja Sama: 2024

Evaluasi RKPD Kabupaten Sukamara Tahun 2023 dilakukan untuk menilai capaian kinerja pembangunan daerah dan efektivitas pelaksanaan program berdasarkan rencana tahunan. Secara keseluruhan, RKPD 2023 menunjukkan kinerja sangat tinggi dengan capaian realisasi anggaran sebesar 91,62% dan kinerja program sebesar 227,38%. Dari total 287 indikator yang dinilai, sebanyak 183 berada dalam kategori sangat tinggi, sedangkan sisanya tersebar di kategori tinggi hingga sangat rendah. Keberhasilan terbesar dicapai pada urusan pelayanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan, sedangkan capaian terendah terdapat pada urusan pengawasan.

Realisasi pendapatan daerah tahun 2023 mencapai 104,02% dari target, dengan kontribusi tertinggi dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang mencapai 118,24%. Namun demikian, realisasi belanja daerah hanya sebesar 91,75% dari proyeksi, dan tidak ada realisasi pada pos belanja tidak terduga. Evaluasi ini juga menyoroti pentingnya penguatan perencanaan oleh OPD, optimalisasi penyerapan anggaran, serta penyempurnaan indikator kinerja ke depan. Prioritas pembangunan pada tahun tersebut diarahkan pada perluasan kerjasama investasi untuk mendukung kesejahteraan masyarakat melalui penguatan sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan ekonomi kerakyatan berbasis UMKM dan potensi sumber daya lokal.

Mitra: Bappeda Kabupaten Sukamara
Tahun Kerja Sama: 2024

Evaluasi RPJMD Kabupaten Sukamara Tahun 2018–2023 dilakukan untuk menilai sejauh mana visi “Terwujudnya Masyarakat Sukamara yang Sejahtera, Maju, dan Bermartabat Didukung Pemerintahan yang Profesional” telah dicapai. Evaluasi ini mencakup analisis atas misi, tujuan, sasaran, dan program pembangunan dalam dokumen RPJMD. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa dari 38 indikator kinerja utama, sebanyak 23 indikator (60,53%) berhasil tercapai, 8 indikator (21,05%) tidak tercapai, dan 7 indikator (18,42%) tidak memiliki data. Sementara dari sisi realisasi fisik dan keuangan, capaian mayoritas program berada pada kategori “sangat tinggi”, meskipun masih terdapat porsi yang signifikan dalam kategori “sangat rendah”.

Capaian tertinggi diperoleh pada misi peningkatan kualitas sumber daya manusia, reformasi birokrasi, dan pembangunan infrastruktur dasar. Di sisi lain, tantangan terbesar terjadi pada sektor ekonomi dan lingkungan hidup, terutama pada indikator pertumbuhan ekonomi, pengangguran, dan ketimpangan gender. Evaluasi juga mengidentifikasi sejumlah faktor pendorong seperti komitmen pemerintah, kolaborasi lintas sektor, dan dukungan anggaran pusat. Sebaliknya, hambatan utama adalah keterbatasan akses, kurangnya data, dan keterbatasan fiskal. Rekomendasi dari evaluasi ini antara lain perlunya penyempurnaan indikator, optimalisasi pemanfaatan data, serta penguatan sinergi lintas sektor untuk perencanaan pembangunan ke depan.

Mitra: Bappeda Kabupaten Seruyan
Tahun Kerja Sama: 2024

RPJPD Kabupaten Seruyan 2025–2045 disusun sebagai kelanjutan dari RPJPD sebelumnya yang akan berakhir pada 2025, dengan tujuan menjadi arah strategis pembangunan jangka panjang daerah selama 20 tahun. Visi yang ditetapkan adalah “Kabupaten Seruyan yang Maju, Tangguh, Mandiri, Sejahtera, dan Berkelanjutan”, yang diterjemahkan ke dalam 8 misi, 17 arah pembangunan, dan 45 indikator utama pembangunan. Refleksi capaian RPJPD 2005–2025 menunjukkan hasil beragam: indikator kemiskinan dan ketimpangan menurun signifikan, namun Indeks Pembangunan Manusia dan pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan. Sementara itu, angka pengangguran justru meningkat.

Permasalahan utama yang dihadapi Kabupaten Seruyan meliputi kualitas infrastruktur, pemerataan layanan pendidikan dan kesehatan, rendahnya investasi, dan kapasitas tata kelola pemerintahan. Isu-isu strategis mencakup konektivitas wilayah, ekonomi hijau, digitalisasi, ketahanan bencana, hingga inklusi sosial. RPJPD ini mengusung Seruyan sebagai simpul pembangunan regional Kalimantan Tengah bagian selatan. Pembangunan dirancang dalam empat tahapan lima tahunan yang berorientasi pada transformasi ekonomi, sosial, tata kelola, dan lingkungan. Target indikator mencakup penurunan stunting menjadi 5%, peningkatan IPM, transformasi digital, dan peningkatan partisipasi ekonomi perempuan. Dokumen ini menjadi fondasi utama bagi arah kebijakan pembangunan daerah yang inklusif, progresif, dan berkelanjutan hingga 2045.

Mitra: WWF Indonesia
Tahun Kerja Sama: 2024

Pelatihan bertajuk "Pengarusutamaan Solusi Berbasis Alam untuk Perencanaan Infrastruktur Berkelanjutan" dilaksanakan pada 26–27 Agustus 2024 sebagai bagian dari inisiatif Sustainable Infrastructure Programme in Asia (SIPA), bekerja sama antara Kementerian PPN/Bappenas, OECD, WWF, UGM, dan mitra lainnya. Tujuan utama pelatihan ini adalah untuk memperkuat kapasitas para pemangku kebijakan nasional dalam mengintegrasikan pendekatan Nature-based Solutions (NbS) ke dalam perencanaan infrastruktur, khususnya untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan dan adaptif terhadap perubahan iklim.

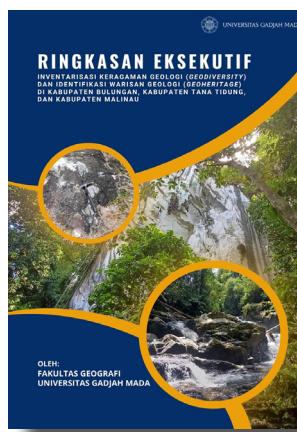
Pelatihan ini menyoroti pentingnya pengelolaan jasa lingkungan dan perlindungan ekosistem dalam pembangunan infrastruktur. Peserta dibekali pengetahuan mengenai konsep dasar NbS, pemodelan ekosistem dengan modul InVEST, integrasi data geospasial, studi kasus pembangunan jalan tol Pekanbaru–Dumai, serta metode cost-benefit analysis terhadap penerapan NbS. Kegiatan ini juga dilengkapi dengan Focus Group Discussion (FGD), di mana peserta menyusun dan mempresentasikan rancangan kebijakan berbasis NbS yang relevan dengan RPJPN, RPJMN, dan rencana strategis kementerian.

Hasil dari pelatihan menunjukkan antusiasme tinggi peserta serta munculnya kesadaran pentingnya pendekatan berbasis alam sebagai alternatif dan pelengkap solusi teknis dalam pembangunan infrastruktur. Pesan dan masukan yang muncul menggarisbawahi perlunya diseminasi hasil pelatihan ke level daerah, penyediaan tutorial teknis, dan kesinambungan program pelatihan. Penyelenggara berharap hasil dari kegiatan ini dapat diterapkan secara nyata dalam proses perencanaan nasional dan menjadi bagian integral dari kebijakan pembangunan berkelanjutan di Indonesia.



Mitra: Badan Geologi Kementerian ESDM RI
Tahun Kerja Sama: 2024

Kegiatan Inventarisasi Keragaman Geodiversity, Geoheritage, dan Pemanfaatan Situs Warisan Geologi bertujuan untuk mengidentifikasi titik-titik potensi keragaman geologi di Kabupaten Bulungan, Malinau, dan Tana Tidung, Provinsi Kalimantan Utara, yang akan diusulkan sebagai Warisan Geologi Nasional. Hal ini merupakan langkah lanjutan dalam proses pengajuan status Geopark Kalimantan Utara. Melalui kerja sama dengan Fakultas Geografi UGM, kegiatan ini berhasil menginventarisasi 26 titik geologi potensial yang tersebar di ketiga kabupaten tersebut. Data yang dihimpun mencakup lokasi, koordinat, serta deskripsi karakteristik geologis tiap titik, didukung oleh analisis petrografi dan pemetaan. Proses identifikasi dilakukan berdasarkan pedoman resmi dari Pusat Survei Geologi, Badan Geologi, Kementerian ESDM, dengan melibatkan tenaga ahli dan asisten ahli dari bidang geologi dan geomorfologi.



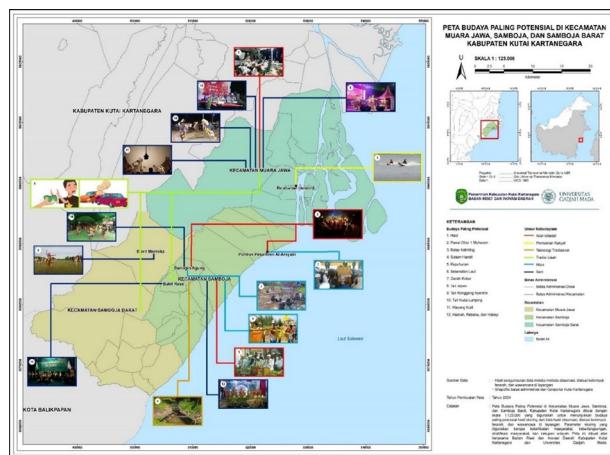
Mitra: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
Tahun Kerja Sama: 2024

Kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Pengelolaan Lahan untuk Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi diselenggarakan oleh Fakultas Geografi UGM bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi (PPKTrans), Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendesa PDTT). Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas pegawai pusat dan daerah dalam pengelolaan lahan yang berkelanjutan sebagai prasyarat penting untuk pengembangan kawasan transmigrasi. Bimtek ini diikuti oleh 75 peserta dan dilaksanakan selama empat hari dengan komposisi 40% materi teori dan 60% praktik. Melalui kegiatan ini, peserta mendapatkan pemahaman praktis terkait sustainable land management, serta arah kebijakan pembangunan transmigrasi yang berorientasi pada keadilan, berbasis data, dan mengedepankan konsep revitalisasi dan revitalisasi kawasan transmigrasi.



Mitra: BRIDA Kutai Kartanegara
Tahun Kerja Sama: 2024

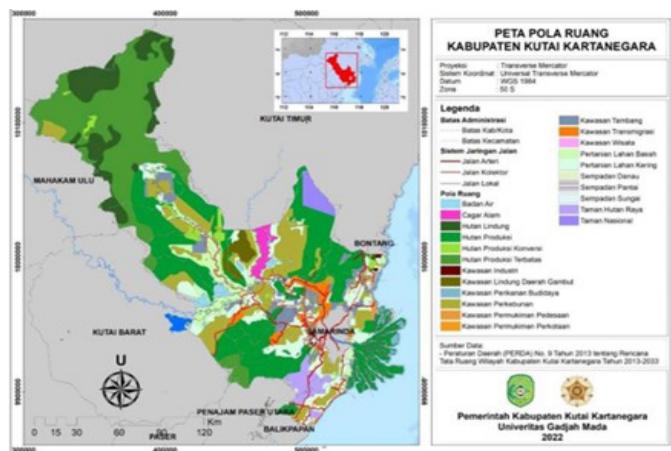
Kegiatan Pemetaan Nilai dan Norma Sosial Budaya di Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan respons terhadap dinamika sosial-budaya yang muncul akibat pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Pemindahan ibu kota ke sebagian wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara menimbulkan tantangan dalam menjaga eksistensi budaya lokal di tengah arus urbanisasi dan akulturasi budaya. Kegiatan ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis budaya asli serta budaya potensial di Kecamatan Muara Jawa, Samboja, dan Samboja Barat berdasarkan unsur kebudayaan menurut Koentjaraningrat, serta memetakan sebaran budaya tersebut secara spasial. Melalui kerja sama dengan Fakultas Geografi UGM, pendekatan etnografi digunakan untuk menggali informasi mendalam melalui observasi, wawancara, dan FGD. Hasil kegiatan ini menunjukkan bahwa dari tujuh unsur budaya yang diteliti, seni merupakan unsur dengan skor potensi tertinggi, diikuti oleh adat istiadat, permainan rakyat, ritus, pengetahuan tradisional, teknologi tradisional, dan tradisi lisan. Sebanyak lima budaya paling potensial diidentifikasi dari unsur seni seperti Tari Jepen, Tari Ronggeng Nyentrik, Tari Kuda Lumping, Wayang Kulit, dan musik rebana-hadrah-habsyi. Selain itu, sistem irigasi handil dan tradisi kepuhunan juga ditemukan memiliki peran signifikan dalam kehidupan masyarakat pesisir. Kegiatan ini menghasilkan basis data budaya pesisir Kutai dan peta visualisasi budaya, serta merekomendasikan pembentukan "inkubator budaya" sebagai ruang akulturasi budaya yang berkelanjutan.



Mitra: Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara
Tahun Kerja Sama: 2024

Kajian Karakteristik Kemiskinan dan Penanggulangannya di Kabupaten Kutai Kartanegara disusun sebagai respons terhadap kompleksitas kemiskinan di tengah pertumbuhan penduduk dan ekonomi yang signifikan di wilayah tersebut. Dengan populasi lebih dari 756 ribu jiwa pada tahun 2023, Kutai Kartanegara menghadapi tantangan sosial yang semakin kompleks, khususnya ketimpangan akses ekonomi, pendidikan, dan infrastruktur. Melalui kerja sama dengan Fakultas Geografi UGM, kajian ini bertujuan untuk mengidentifikasi karakteristik kemiskinan secara menyeluruh—baik secara objektif maupun subjektif—di tiga wilayah studi, yakni Desa Menamang Kanan, Kelurahan Loa Ipuh, dan Desa Salok Api Laut.

Hasil kajian menunjukkan bahwa mayoritas penduduk pra-sejahtera tidak memiliki lahan (75%) dan memiliki tingkat pendidikan rendah, yang berimplikasi langsung pada keterbatasan peluang kerja. Sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan menjadi lapangan kerja dominan bagi kelompok ini, namun masih terdapat angka pengangguran yang signifikan. Kajian ini juga mencatat bahwa sebagian besar rumah tangga miskin memiliki pengeluaran di bawah garis kemiskinan, meski terdapat 12% yang memiliki pengeluaran dua kali lipat dari batas tersebut. Secara subjektif, penduduk memaknai kemiskinan sebagai ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar (pangan, sandang, papan), yang mengindikasikan kondisi sosial-ekonomi yang belum sejahtera. Kajian ini menghasilkan rekomendasi strategis untuk pengentasan kemiskinan, seperti peningkatan akses pendidikan, pelatihan kerja berbasis potensi lokal, reformasi kebijakan bantuan sosial agar lebih inklusif, serta pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan tanpa bergantung pada sektor pertambangan.



Mitra: DISPERTARU Kota Yogyakarta
Tahun Kerja Sama: 2024

Penyusunan Pengawasan Pemanfaatan Ruang Tanah Kasultanan dan Kadipaten di Kota Yogyakarta merupakan inisiatif strategis dari Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Yogyakarta bekerja sama dengan Fakultas Geografi UGM. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap rencana tata ruang yang berlaku, khususnya di atas lahan Tanah Kasultanan dan Kadipaten. Pengawasan ini mencakup tindakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan yang dilaksanakan dengan metode survei lapangan berbasis My Maps dan Google Street View. Hasil survei mencatat total 2.033 titik pemanfaatan lahan tersebar di seluruh kemandren dan kelurahan Kota Yogyakarta. Dari jumlah tersebut, 1.651 titik dikategorikan sebagai pemanfaatan yang diizinkan, sementara sisanya masuk dalam kategori terbatas, bersyarat tertentu, terbatas-bersyarat, dan tidak diizinkan. Selain itu, informasi pemanfaatan ruang tersebut dipetakan dalam sistem informasi digital yang memungkinkan pemantauan lebih efektif. Kegiatan ini menghasilkan data spasial yang akurat dan rekomendasi teknis untuk pengawasan lanjutan, termasuk perlunya sistem pengawasan berbasis teknologi informasi yang terintegrasi, serta mekanisme penertiban ruang sesuai dengan ketentuan zonasi dan peraturan daerah yang berlaku. Keseluruhan proses ini menjadi bagian penting dalam menjaga keseimbangan antara pembangunan dan pelestarian nilai historis serta fungsi tata ruang di wilayah perkotaan Yogyakarta.

Penyusunan Draft Peraturan Walikota Tentang Penegasan Batas Kelurahan di Tujuh Kemanren Tahun 2024

Mitra: DISPERTARU Kota Yogyakarta
Tahun Kerja Sama: 2024

Penyusunan Draf Peraturan Walikota tentang Penegasan Batas Kelurahan di Tujuh Kemanren Kota Yogyakarta dilaksanakan sebagai upaya untuk menciptakan ketertiban administrasi dan kepastian hukum dalam batas wilayah administratif di tingkat kelurahan dan kemanren. Kegiatan ini merupakan kerja sama antara Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kota Yogyakarta dengan Fakultas Geografi UGM. Tujuan utama dari kegiatan ini adalah menghasilkan dokumen draf Peraturan Walikota yang menetapkan batas-batas wilayah kelurahan di tujuh kemanren, yaitu Gondomanan, Tegalrejo, Gedongtengen, Ngampilan, Kraton, Pakualaman, dan Danurejan. Proses penyusunan dilakukan melalui tahapan survei pengukuran pilar batas menggunakan metode GNSS geodetik, orientasi awal terhadap sebaran pilar batas, serta FGD bersama tokoh masyarakat dan aparat kelurahan untuk validasi kartometrik. Dari kegiatan pengukuran, tercatat terdapat 110 titik pilar batas, dengan dua titik yang tidak ditemukan secara fisik namun tetap diukur sebagai dasar pemasangan ulang. Data teknis dan koordinat geodetik dari pilar-pilar tersebut menjadi dasar dalam penyusunan peta kerja dan dokumen regulasi. Produk akhir dari kegiatan ini berupa peta batas kelurahan, berita acara kesepakatan batas, serta draf Peraturan Walikota yang mengacu pada peraturan sebelumnya, yakni Perwal No. 48 Tahun 2023.

Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta Tahun 2025-2055

Mitra: Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta
Tahun Kerja Sama: 2024

Penyusunan dokumen RPPLH Kota Yogyakarta 2025–2055 dilatarbelakangi oleh meningkatnya tekanan terhadap daya dukung dan daya tampung lingkungan akibat urbanisasi, kepadatan penduduk, dan pertumbuhan pembangunan fisik yang pesat. Kota Yogyakarta yang memiliki kepadatan tertinggi di DIY menghadapi berbagai permasalahan lingkungan seperti pencemaran air dan udara, degradasi lahan, peningkatan timbulan sampah, dan kerentanan terhadap bencana hidrometeorologis. Dokumen ini disusun sebagai bentuk implementasi kewajiban pemerintah kota dalam memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta sebagai rujukan penting dalam integrasi pembangunan berkelanjutan jangka panjang selama 30 tahun ke depan.

Melalui kerja sama antara Pemerintah Kota Yogyakarta dan Fakultas Geografi Universitas Gadjah Mada, dokumen ini disusun untuk menyediakan arahan dan kebijakan strategis berbasis ekoregion. Tujuannya adalah untuk mengarahkan pemanfaatan sumber daya alam secara bijak, menjaga kualitas fungsi lingkungan hidup, serta meningkatkan adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim. Hasil penyusunan RPPLH ini mencakup inventarisasi kondisi lingkungan, identifikasi isu strategis seperti turunnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH), penyusunan indikator daya dukung dan tampung lingkungan, serta rencana aksi tematik yang terintegrasi dengan RPJMD, RTRW, dan KLHS.

Mitra: Kementerian Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
Tahun Kerja Sama: 2024

Kajian ini bertujuan untuk menganalisis potensi dan risiko pelaksanaan program Transmigrasi Swakarsa Mandiri (TSM) bagi generasi milenial di kawasan Transmigrasi Telang, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan. TSM merupakan pendekatan baru dalam transmigrasi berbasis hunian layak, kepemilikan lahan, serta dukungan ekonomi produktif bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), khususnya generasi muda. Kajian ini lahir sebagai respons terhadap stagnasi minat transmigrasi dan tingginya backlog kepemilikan rumah di kalangan MBR non-fix income.

Melalui kolaborasi dengan Fakultas Geografi UGM, kajian ini mengidentifikasi berbagai risiko dan peluang melalui pendekatan analisis risiko terintegrasi yang mencakup empat pilar utama: sumber daya manusia, sumber daya alam, ekonomi-bisnis, dan ikon branding kawasan. Lokasi studi berada di Desa Mulia Sari, Kecamatan Tanjung Lago, yang telah ditetapkan sebagai Kawasan Perencanaan Bersama (KPB) dalam skema pengembangan Transpolitan. Evaluasi dilakukan terhadap potensi agropolis (agroproduksi, agroindustri, agrobisnis, agroteknologi, dan agrowisata), menunjukkan bahwa hortikultura dan walet memiliki nilai ekonomi tertinggi, meski dengan tantangan risiko kegagalan panen dan keterbatasan teknologi.

Hasil kajian menyimpulkan bahwa keberhasilan TSM sangat dipengaruhi oleh kesiapan SDM lokal, akses terhadap teknologi pertanian, penguatan pasar dan rantai nilai, serta dukungan infrastruktur dasar. Risiko utama yang teridentifikasi mencakup rendahnya tingkat pendidikan, keterampilan teknologi yang terbatas, serta ketimpangan akses permodalan. Fakultas Geografi UGM berperan penting dalam pemetaan spasial kawasan, penyusunan strategi mitigasi risiko, dan perumusan pendekatan berbasis wilayah dan sumber daya.

Mitra: Kementerian ATR/BPN
Tahun Kerja Sama: 2024

Evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Barat periode 2021–2023 menunjukkan capaian yang beragam di berbagai sektor pembangunan. Visi pembangunan daerah yang ingin mewujudkan masyarakat “Semakin Adil, Mandiri, dan Sejahtera” melalui ekonomi kerakyatan dan peningkatan SDM telah diimplementasikan melalui empat misi utama, meliputi pengembangan ekonomi lokal, peningkatan kualitas SDM, tata kelola pemerintahan yang baik, serta pemerataan infrastruktur.

Dari aspek keuangan, Pendapatan Asli Daerah (PAD) menunjukkan pertumbuhan positif dengan rata-rata 18,82% per tahun, mencapai puncaknya pada tahun 2023 sebesar Rp201 miliar. Namun, kontribusi terbesar masih berasal dari pendapatan non-unggulan, seperti “lain-lain PAD yang sah,” sementara pendapatan dari pengelolaan kekayaan daerah masih minim. Belanja daerah juga mengalami peningkatan signifikan, terutama pada tahun 2023, yang mencerminkan komitmen pemerintah dalam pembiayaan pembangunan. Analisis rasio likuiditas dan solvabilitas menunjukkan kondisi keuangan yang sehat, dengan kemampuan melunasi utang jangka pendek yang memadai dan rasio utang terhadap aset yang rendah.

Pada sektor ekonomi, kontribusi sektor pertanian dan pariwisata terhadap PDRB melebihi target, meskipun tingkat pengangguran meningkat menjadi 6,16% di tahun 2023. Di bidang SDM, capaian pendidikan dan kesehatan cukup baik, dengan angka harapan lama sekolah dan usia harapan hidup memenuhi target. Infrastruktur dasar seperti akses air minum layak dan jaringan jalan telah melampaui target, namun elektrifikasi rumah tangga masih perlu ditingkatkan. Sementara itu, indeks kualitas air dan udara mengalami fluktuasi dan belum sepenuhnya mencapai target yang ditetapkan.

Pemerintah Kabupaten Kutai Barat menjalin kerja sama dengan Fakultas Geografi UGM untuk memperkuat perencanaan pembangunan berbasis geospasial. Kolaborasi ini bertujuan memetakan potensi sumber daya alam dan kearifan lokal, serta mengidentifikasi wilayah prioritas pembangunan berkelanjutan. Hasilnya berupa peta tematik dan rekomendasi pengembangan kawasan, seperti pengelolaan kebun kelapa sawit dan keramba jaring apung, yang diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi kerakyatan.

Mitra: Bappeda Kabupaten Sukamara
Tahun Kerja Sama: 2024

Grand Design Pembangunan Kependudukan Kabupaten Sukamara Tahun 2024-2049 (GDPK) disusun sebagai panduan strategis jangka panjang guna menghadapi kompleksitas isu kependudukan yang terus berkembang seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk, urbanisasi, serta tantangan sosial-ekonomi dan lingkungan. Penyusunan ini merupakan implementasi dari amanat Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 dan Perpres Nomor 153 Tahun 2014 yang mewajibkan seluruh pemerintah daerah untuk menyusun GDPK sebagai dokumen perencanaan lintas sektor dan waktu. Kegiatan ini dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Sukamara bekerja sama dengan Fakultas Geografi UGM, yang berperan dalam pemetaan, analisis spasial, serta pendalaman indikator sosial-ekonomi dan spasial berdasarkan lima pilar pembangunan kependudukan.

GDPK ini bertujuan untuk mewujudkan penduduk yang tumbuh seimbang, berkualitas, tersebar secara merata sesuai daya dukung lingkungan, serta berdaya secara sosial dan ekonomi. Kelima pilarnya meliputi: pengendalian kuantitas penduduk, peningkatan kualitas penduduk (pendidikan, kesehatan, ekonomi), pembangunan keluarga, pengarahan mobilitas penduduk, serta penataan administrasi kependudukan. Dokumen ini berhasil mengidentifikasi isu-isu strategis seperti lambatnya laju pertumbuhan penduduk, ketimpangan infrastruktur dan distribusi tenaga kerja, tingginya kemiskinan, dan ketidakteraturan data kependudukan akibat sistem SIAK yang terpusat. Sebagai respons, GDPK menetapkan kebijakan-kebijakan unggulan seperti peningkatan migrasi masuk berbasis pendidikan dan investasi, pemberdayaan UMKM, pengembangan pusat pertumbuhan baru di wilayah selatan, penguatan layanan dasar pendidikan dan kesehatan, serta optimalisasi bonus demografi melalui pendidikan vokasional dan pelatihan digital.

Mitra: Kementerian ATR/BPN
Tahun Kerja Sama: 2024

Kegiatan ini merupakan inovasi dalam pengembangan Informasi Geospasial Tematik Derivatif yang dilaksanakan melalui kerja sama antara Kementerian ATR/BPN dan Fakultas Geografi UGM. Tujuannya adalah untuk menyediakan informasi spasial tematik yang dapat mendukung pengambilan kebijakan berbasis data dalam pengelolaan pertanahan dan perencanaan wilayah, terutama di wilayah Yogyakarta dan sekitarnya. Kajian ini memanfaatkan pendekatan Geospatial Artificial Intelligence (GeoAI), yaitu integrasi antara keilmuan geografi dan teknologi kecerdasan buatan, untuk memodelkan dinamika penggunaan lahan, permukiman, dan ruang terbuka hijau secara komprehensif dan prediktif.

Hasil dari kegiatan ini mencakup tiga luaran utama: (1) model pemetaan potensi pengembangan permukiman menggunakan pembelajaran mesin berbasis data citra satelit resolusi tinggi, (2) prediksi perubahan perkembangan wilayah dan kota melalui simulasi Cellular Automata dan Markov Chain, serta (3) penentuan lokasi optimal ruang terbuka hijau (RTH) berbasis model decision tree dan Random Forest. Wilayah studi meliputi Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman, Klaten, dan Kulon Progo, yang dipilih karena representatif terhadap dinamika urban-rural. Kajian ini berhasil menghasilkan peta probabilitas pertumbuhan permukiman, model prediktif perkembangan kawasan terbangun hingga 2030, serta rekomendasi zona prioritas pengembangan RTH berdasarkan variabel seperti kepadatan penduduk, jarak ke jalan, dan risiko bencana. Kajian ini juga mencerminkan transformasi data geospasial menjadi informasi aplikatif untuk mendukung hilirisasi kebijakan tata ruang, investasi hijau, dan kota pintar berkelanjutan.





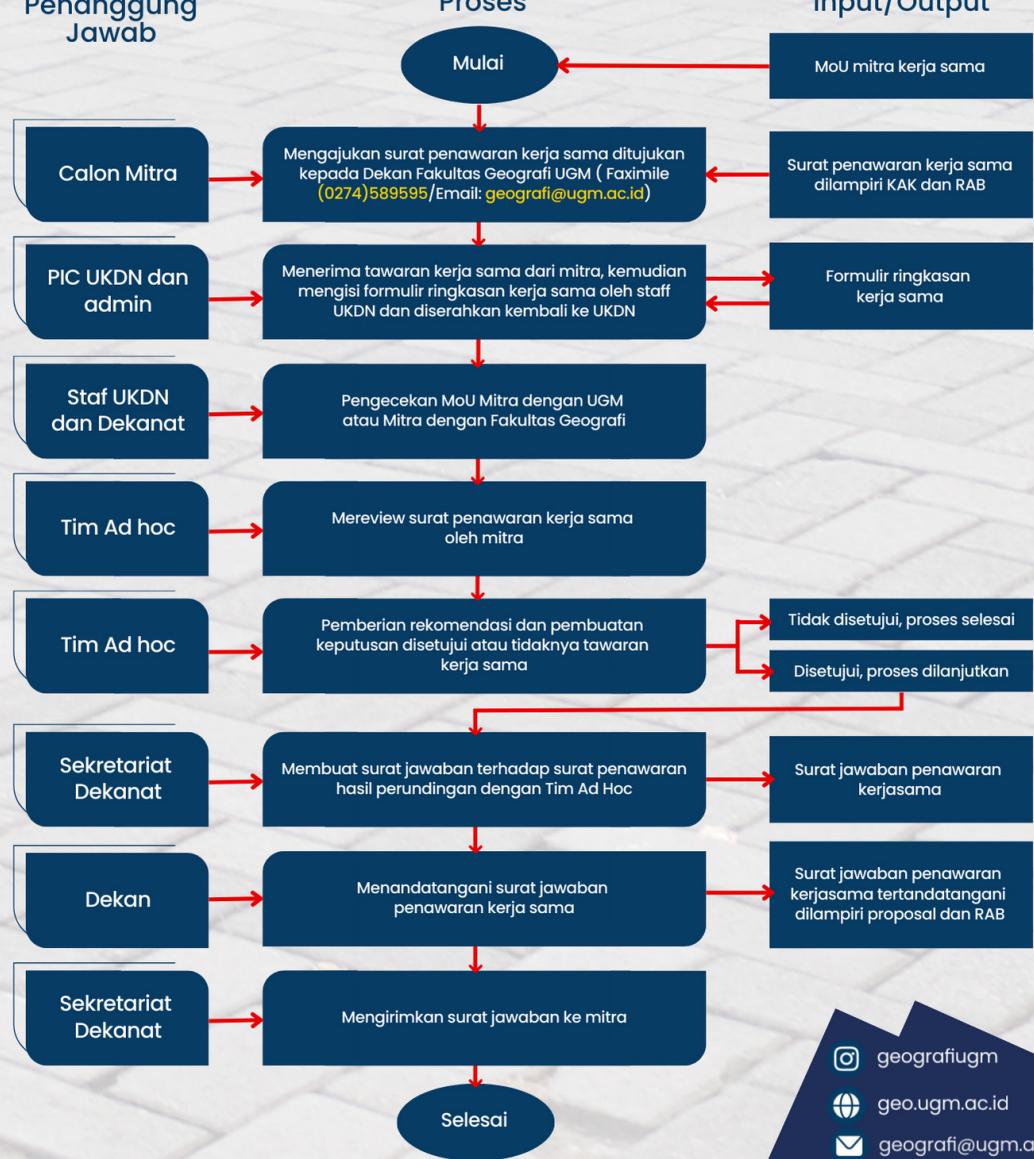
SOP KERJA SAMA UKDN

Fakultas Geografi

Penanggung Jawab

Proses

Input/Output





KONTAK UNIT KERJA SAMA DALAM NEGERI

Fakultas Geografi



UNIT KERJA SAMA DALAM NEGERI

Unit Kerja Sama Dalam Negeri, KLMB Lt. 5, Fakultas Geografi, Universitas Gadjah Mada

✉ ukdn.geo@ugm.ac.id

✉ cc: geografi@ugm.ac.id

📞 (+62) 82110031699

TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

